

**SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT
DALAM MANAJEMEN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

RIMA SILLA ARFINIANTI

NIM 0510310109



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

2009

MOTTO

**Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu adalah dari (kesalahan) dirimu sendiri
(QS An-Nisa' 79)**

**Jika Kamu Tidak Bisa Menjadi Cemara Yang Tegak Di Atas Bukit Jadilah Rumput Yang Memperkuat Tanggul
(Anonymous)**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam
 Manajemen Bencana Di Kabupaten Bojonegoro

Disusun oleh : Rima Silla Arfinianti

NIM : 0510310109

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 6 Juli 2009

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 131 966 869



Drs. Siswidiyanto, M.S
 NIP 131 573 951

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI FAKULTAS
ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA :

HARI : JUMAT
TANGGAL : 31 JULI 2009
JAM : 09.00-10.00
SKRIPSI ATAS NAMA : RIMA SILLA ARFINIANTI
JUDUL : SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MASYARAKAT DALAM
MANAJEMEN BENCANA DI KABUPATEN
BOJONEGORO

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI



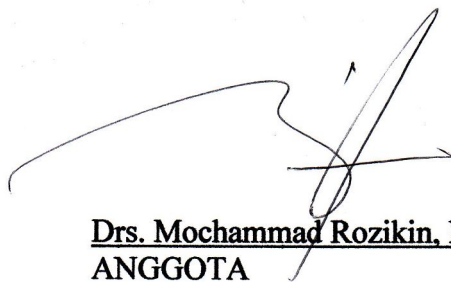
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
KETUA



Drs. Siswidiyanto, M.S
ANGGOTA



Dr. Luqman Hakim, M.Sc
ANGGOTA



Drs. Mochammad Rozikin, M.AP
ANGGOTA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Juli 2009



Rima Silla Arfinanti
NIM. 0510310109

RINGKASAN

Arfinianti, Rima Silla. 2009. **Sinergi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kabupaten Bojonegoro**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Pembimbing (1) Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph. D (2) Drs. Siswidiyanto, M.S. 111 hal + xi

Banjir di daerah Bojonegoro sudah menjadi menu rutin tahunan terutama di musim penghujan, warga sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, sering kali banjir dianggap remeh. Selain menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi bencana yang terjadi, sebagai anggota masyarakat, kita wajib berperan serta untuk bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya banjir dengan persiapan dini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Sinergi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kabupaten Bojonegoro” dengan permasalahan bagaimana sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam manajemen bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini mengacu pada Teori Manajemen Bencana menurut Stephen Ambrose, Shahid, dan Rodney Mc. Kellip, Penanggulangan Bencana menurut UU No.24 Tahun 2007.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan sumber data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri; metode analisa dan interpretasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Data primer dan sekunder menunjukkan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat telah berjalan dengan cukup baik ditunjukkan dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat mencakup tiga hal, meliputi pelaksanaan sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana dan pada tahap pemulihan atau pasca bencana.

Dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam manajemen bencana dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi ; Koordinasi antar Dinas dan Instansi terkait dilaksanakan dengan baik, Kebersamaan antar masyarakat yang terlihat dari bantuan yang diberikan, Masyarakat yang telah setiap tahun terkena banjir cenderung lebih siap menghadapi banjir. Sedangkan faktor penghambat meliputi; Pemikiran masyarakat yang masih sederhana dan cenderung menganggap remeh bencana, Tenaga yang kurang terlatih di Pemerintahan sehingga hanya mengandalkan Tim SAR.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro maka langkah yang perlu dilakukan dalam sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam manajemen bencana yaitu sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih mendidik masyarakat di bantaran sungai; Lebih mengoptimalkan peran Lembaga-lembaga lokal yaitu Kelurahan dan RT/RW dalam melaksanakan manajemen bencana; Pemerintah Daerah lebih memenuhi kebutuhan peralatan untuk mengatasi genangan air akibat banjir sehingga lebih cepat dalam proses pemulihan pasca banjir; Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan kerjasama antar daerah di sepanjang sungai Bengawan Solo dalam mengatasi bencana banjir

SUMMARY

Arfinianti, Rima Silla. 2009. Synergies between the Regional Government of the People In Disaster Management in Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Public Majors Administration. Counsellor. Guide (1) Drs. Andy Wijaya Fefta, MDA, Ph. D (2) Drs. Siswidiyanto, M.S. 111 matter + xi

Bojonegoro floods in the region has become the routine annual especially in the rainy season, people already familiar with such a condition, often considered unimportant flood. In addition to demanding the government to further increase capacity in the disaster that occurred, as a member of the community, a role we must be ready and prepared to face the threat of flood risk with the preparation early. This study aims to discuss about "Synergies between the Regional Government of the People In Disaster Management in Kabupaten Bojonegoro" problems with how the synergy between the Regional Government and the community in disaster management that occurred in Kabupaten Bojonegoro. This research draws on theories of Disaster Management by Stephen Ambrose, Shahid, and Rodney Mc. Kellip, according to the Disaster Relief Undang-Undang No.24 Tahun2007.

Research using qualitative methods with a descriptive approach. This method of using primary and secondary data; techniques of collecting data with observations, interviews and documentation; instruments used the guidance interviews, field notes, the researchers themselves; methods of analysis and interpretation of data includes data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions.

Primary and secondary data indicate that the synergy between the Regional Government and the Society has been running relatively well in the indicated cooperation between Local Government and Community includes three things, including the implementation before the disaster, at the time of the disaster and on the stage or post-disaster recovery.

From the results of the analysis of the data can be drawn the conclusion that the synergy between local government and communities in disaster management is influenced by factors that support and resistor. Supporting factors include; Coordination between the Department and related institutions performed well, among people who cooperation seen from the assistance provided, the Society has been affected by floods each year tend to be more ready to face flooding. While factors include resistor; idea that people still tend to be simple and think little of the disaster, the Labor Government in the less skilled, so only rely on the SAR.

See the results of research conducted in Kabupaten Bojonegoro the steps that need to be in the synergy between local government and communities in disaster management are as follows: Kabupaten Bojonegoro better educate the public on flood plains; Further optimize the role of local institutions, namely Kabupaten and RT / RW in implementing the disaster management, Local Government more equipment to meet the needs of the water due to flood so much faster in the process of post-flood recovery; Local Government Kabupaten Bojonegoro further increase cooperation between the regions along the Bengawan Solo river in the flood disaster.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan ma'unah-Nya akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Sinergi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kabupaten Bojonegoro". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Ibu Yuniati dan Bapak Muryanto atas segala kasih sayang, nasihat, materi dan doa yang tak pernah putus bagi kehidupan penulis selama ini.
2. Adek-adekku Rosa dan Dhea, Dek Fahmi, Lek Sri, Lek Yan, Nenek-nenekku, Om-om, Tante-Tanteku, Keluarga di Padangan Bude-budeku, Mbak-mbak dan Mas-masku dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas segala sudah memberikan dukungan dan doanya.
3. Antok Tri Saputro dan Keluarga semua terima kasih atas semua perhatian, dukungan, semangat dan segala doa yang diberikan.
4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Ketua Pembimbing, dan Bapak Drs. Siswidiyanto, M.S selaku Anggota Pembimbing yang telah sabar dan menyempatkan waktu padatnya untuk dapat membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.

5. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc dan Bapak Drs. Mochammad Rozikin, M.AP sebagai dosen penguji telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tugas akhir ini.
6. Rindhy, Qq, Rere, Sutri, Lemot, PE, Mbak Siska, Tunjung, Saras, makasih atas dukungan, kasih sayang, kepercayaan, jalan-jalan, dan materi buat tugas-tugasnya selama kuliah. Teman SMAku Wahyu, Nina, Ardhi, GT, Siska, Pungky, Dhani makasih buat persaudaraannya yang tak pernah putus. Teman-teman seperjuangan saat bimbingan Robi, Andrias, Septi, Puput, Putri, Dhian, Riris, Savitri, Afifa dan semua teman-temanku di FIA angkatan 2005 yang tak bisa disebutkan semua makasih buat semuanya.
7. Eri, Rista, Emon, Mbak Dora, Discha, Candra, Mbak Yongmi, Mbak Maci, Mbak Erlina, Mbak Copi, Mbak Moku, Elsa, Yanti, All the people in Kersent 76, terima kasih atas semangat kebersamaannya.
8. Bapak Maskan Ali selaku anggota Satlak PBP Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ir. Andi Tjandra, MM selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Bojonegoro, dan Bapak. Mohamad Yasir, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Ledok Wetan, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian penelitian ini.
9. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu.

Teriring doa semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih perlu, adanya koreksi, saran, dan kritikan yang konstruktif dan sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Administrasi Publik	7
1. Definisi Administrasi Publik	7
2. Peran Administrasi Publik	9
B. Administrasi Pemerintahan Daerah	10
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	10
2. Peran Pemerintah Daerah	12
3. Model Peran Pemerintah Daerah	13
C. Teori Governance dan Kemitraan	14
1. Teori Governance	14
a. Pengertian <i>Governance</i>	14
b. <i>Local Governance</i>	15
c. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	18
d. Pilar-Pilar <i>Good Governance</i>	24
2. Teori Kemitraan	26
a. Definisi Kemitraan	25
b. Beberapa Teori Kemitraan	26
c. Kemitraan di Sektor Pemerintahan	28
D. Manajemen Bencana	30
1. Pengertian Bencana	30
2. Pengertian Bencana Alam di Indonesia	31
3. Penanggulangan Bencana	32
E. Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat	41
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	47

C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Instrumen Penelitian	51
G. Analisis Data.....	52

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	54
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	54
2. Iklim	54
3. Topografi	55
4. Administrasi	56
5. Kependudukan	58
6. Kondisi Perekonomian	61
7. Potensi Daerah	63
B. Penyajian Data Fokus	71
C. Pembahasan.....	101

BAB V: PENUTUP 109

1. Kesimpulan	109
2. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Halaman

1. Luas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Menurut Kemiringan Tanah	55
2. Luas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Menurut Ketinggian Tempat	56
3. Luas Areal Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Tanah	56
4. Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007	57
5. Data Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Sampai Tahun 2007	58
6. Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Menurut Golongan Umur ...	59
7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	60
8. Jumlah Perkembangan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha ...	60
9. PRDB Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	62
10. PRDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	62
11. Perkiraan Debit Banjir Bengawan Solo dari Karangnongko ke Bojonegoro	78
12. Data Ketinggian Air	81
13. Rekapitulasi Penerimaan Bantuan Satlak PBP	92
14. Rekapitulasi Korban Bencana Alam Banjir Kabupaten Bojonegoro.....	95
15. Kerugian Banjir Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro	95
16. Data Penanganan/Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Pasca Banjir Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009	98



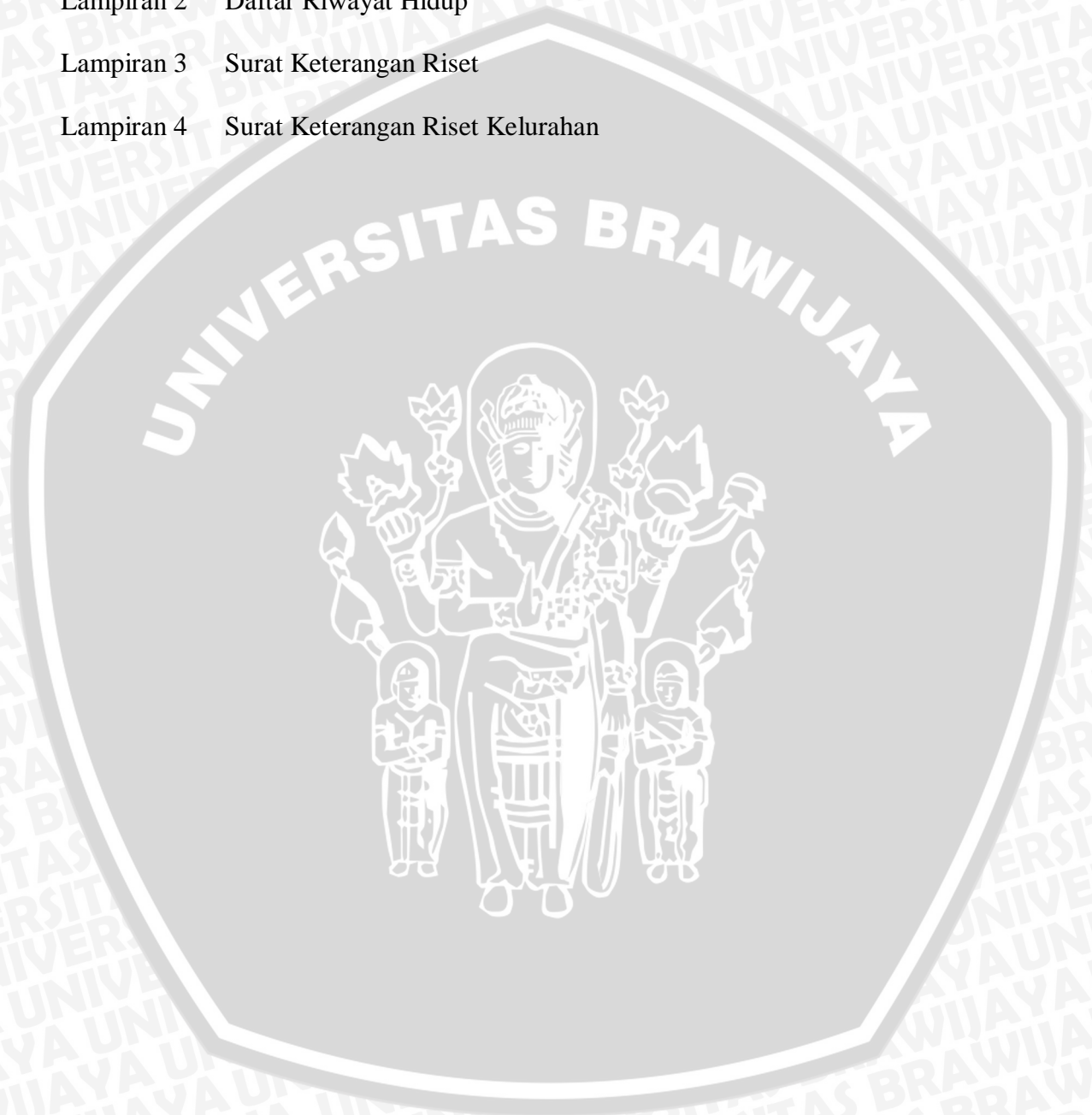
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Siklus Manajemen Bencana menurut Stephen Ambrose, Shahid, Rodney Mc. Kellip	34
2. Peta Rawan Bencana Kabupaten Bojonegoro	72
3. Waktu Perjalanan Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (Jam)	77
4. Peta Penyebaran Bantuan dan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro	93



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto Kegiatan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bojoneoro
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset Kelurahan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan, kita tidak dapat terpisahkan oleh apa yang dimaksud dengan bencana. Suatu bencana timbul disebabkan oleh adanya faktor alam dan akibat ulah manusia (*man made disaster*). Seiring berjalannya waktu banyak sekali bencana yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor alam sehingga tidak ada yang patut dipersalahkan ketika bencana menghilangkan banyak harta benda dan tak terkecuali nyawa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berpendapat hal ini kemungkinan terjadi karena eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan yang telah menyebabkan perubahan kondisi lingkungan hidup secara sangat cepat dan masif (<http://www.walhi.ac.id>).

Pada hakekatnya semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, ulah manusia, dan atau keduanya, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/bencana asap, wabah hama penyakit, dan bencana akibat kecelakaan industri serta kegagalan teknologi yang selalu mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Lebih Lanjut dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 butir 1 menyebutkan “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Penanganan bencana selama ini telah diupayakan untuk ditangani oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, pengalaman penanganan bencana selama ini tampaknya belum berjalan dengan baik. Pemerintah dan masyarakat terbukti kurang begitu mampu untuk mengatasi masalah-masalah darurat seperti ini. Dengan alasan kendala-kendala seperti ketiadaan dana, birokrasi, fasilitas dan lain-lain membuat kondisi paska bencana bagaikan bencana baru bagi mereka yang mengalaminya. Kondisi seperti ini menggugah kita untuk kembali merefleksikan bahwa upaya kesiapsiagaan

menjadi kondisi perlu untuk dilakukan oleh semua lapisan baik di tingkat individu, masyarakat dan pemerintah.

Koordinasi yang telah dilaksanakan sejak dari lokasi bencana di daerah sampai pada tingkat nasional telah berjalan cukup baik. Namun mengingat banyaknya kejadian bencana, mengharuskan untuk lebih dimantapkan kualitas dari manajemen bencana. Hal ini bisa dilihat dari Undang-undang yang mengatur tentang manajemen bencana yang semakin harus dimantapkan kualitasnya.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 1 butir 5 bahwa: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi”.

Lebih lanjut di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 ini disebutkan pula bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Namun pada kenyataannya undang-undang belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat karena keterbatasan dalam kemampuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi. Selain itu, beragamnya departemen dan institusi yang terkait dalam penanggulangan bencana pada dasarnya sangat diperlukan, tetapi ketidakjelasan garis komando antar departemen dan institusi serta prosedur yang berbelit-belit membuat upaya penanggulangan tidak terkoordinasikan dengan baik. Lebih parah lagi, bencana hanya ditangani dengan pendekatan *emergency response* (tanggap darurat). Sementara itu, pasca bencana rakyat dibiarkan dengan penderitaan yang menimpanya. UNDP (1992:21) dalam tinjauan umum manajemen bencana dijelaskan tentang fase manajemen bencana yang meliputi fase pengurangan resiko pra-bencana yang meliputi kesiapan dan mitigasi, dan fase pemulihan yang meliputi bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan publik kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta benda. Dalam hal ini masyarakat sebagai korban bencana harus secara aktif bekerjasama dengan pemerintah agar sinergi yang terjalin dan yang terpenting dari manajemen

bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan cepat.

Dalam konteks administrasi publik seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen bencana pada dasarnya merupakan usaha pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan masyarakat sebagai korban dari bencana yang terjadi. Pasolong (2007:8) mendefinisikan administrasi publik sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Tentu saja perkembangan administrasi publik akan dapat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan tuntutan aspirasi dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang cenderung dinamis. Oleh karena itu, peran administrasi publik dalam hal ini berupa upaya kongkrit yaitu berbagi peran dalam pelaksanaan pemeliharaan kawasan hijau, posisi birokrat sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mengakomodir persoalan serta melegitimasi hak masyarakat. Sedangkan masyarakat, akademisi, NGO diharapkan memainkan peranan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah.

Gerakan yang sinergis antara masing-masing elemen komponen tersebut dalam menyelamatkan alam lingkungan, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif pasca bencana. Pemulihan (*recovery*) kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid ketika kita mencoba membangun manajemen bencana (*disaster management*) agar siklus normalisasi kehidupan termasuk rehabilitasi tercapai dengan rentang waktu yang lebih pendek.

Banjir di daerah bojonegoro sudah menjadi menu rutin tahunan terutama di musim penghujan, warga sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, sering kali banjir dianggap remeh, sebagai anggota masyarakat, kita wajib berperan serta untuk bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya banjir dengan persiapan dini. Banjir merupakan bencana alam yang perlu mendapat perhatian, karena mengancam jiwa dan ekonomi masyarakat. Banjir merupakan bencana alam yang telah banyak menelan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Banjir yang terjadi di daerah Bojonegoro pada beberapa tahun terakhir membutuhkan perhatian yang lebih dan menuntut pemerintah untuk lebih

meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi bencana yang terjadi. Secara geografis Kabupaten Bojonegoro yang dilalui sungai Bengawan Solo merupakan wilayah hilirnya berpotensi banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi, kepadatan pemukiman sekitar bantaran sungai, penambangan galian C. Berikut merupakan data akibat bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro yang sumbernya diambil dari Satlak penanggulangan bencana dan pengungsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Data korban banjir pada tahun 2007/2008 sebanyak 283.945 jiwa, korban meninggal 8 orang sedangkan yang mengungsi 157.106 jiwa tersebar 202 lokasi (sumber: Satlak penanggulangan bencana dan pengungsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). Banjir merendam 20 desa di beberapa Kecamatan antara lain: Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Dander, Kecamatan Ngraho (Karangnongko), Kecamatan Padangan, Kecamatan Kaliditu, Kecamatan Trucuk (Guyangan), bahkan sampai masuk ke Kecamatan Bojonegoro (Ledok Wetan, Ledok Kulon, Kauman, Klangon, Sukorejo, Mojokampung).

Data korban banjir tanggal 3 Pebruari 2009 sampai 8 Pebruari titik puncak ketinggian air di Bojonegoro mencapai 15.07 m, melanda 15 Kecamatan, 119 desa dan 11.027 rumah.

Untuk data korban banjir tanggal 23 Maret sampai 3 Maret 2009 titik puncak ketinggian air mencapai 15.54 m pada tanggal 28 Maret 2009, melanda 15 Kecamatan, 155 Desa, 32.961 kk, korban meninggal mencapai 7 orang, dan merusak jalan beserta areal pertanian serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, masjid dan gedung-gedung sekolah.

Akar permasalahan terjadinya bencana banjir adalah, kurangnya penghijauan di daerah aliran sungai Bengawan Solo, serta kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan di sekitarnya.

Bencana ini menimbulkan dampak yang negatif antara lain, kurangnya kemandirian daerah karena bantuan yang banyak, hilangnya semangat belajar karena kekurangan sarana (buku pelajaran, meja, alat-alat lab, dsb), persiapan ujian makin kurang, harga kebutuhan menjadi melangit (akan normal dalam jangka waktu tertentu), petani gagal panen dengan kerugian yang sangat besar, dan angka kemiskinan meningkat.

Guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mulai dari tingkat Desa/Kelurahan maka perlu diatur mekanisme dalam suatu sistem, yang dapat mendorong kemandirian dalam keswadayaan masyarakat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan melakukan berbagai upaya antisipasi dan partisipatif secara terpadu melalui swadaya masyarakat yang dipelopori oleh anggota Sat.Hansip/Linmas yang terlatih dibawah koordinasi Kepala Desa/Kelurahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka perlu dibuat manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Daerah, Lembaga Lokal beserta masyarakat. Berangkat dari berbagai latar belakang masalah tersebut, penulis memilih judul penelitian : “Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kabupaten Bojonegoro”.

B. Perumusan Masalah

Oleh karena pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat terhadap manajemen bencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka permasalahan yang untuk diketahui dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam Manajemen Bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Bojonegoro?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat manajemen bencana di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat manajemen bencana di Bojonegoro

2. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk lebih meningkatkan perannya dalam menanggulangi bencana yang terjadi.
- b. Sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan di bidang Administrasi Publik dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika bahasan

Bab II merupakan penjelasan tentang kajian pustaka atau kajian teori yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu teori yang berkenaan dengan peran administrasi publik serta interaksinya dengan masyarakat dalam manajemen bencana.

Bab III menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisa data.

Bab IV menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat penyajian data dan analisa data

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, serta saran yang merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan yang akan datang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “*Public Administration*” diganti menjadi Administrasi Negara.

Chandler & Plano dalam Pasolong (2007:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Lebih lanjut Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Felix A. Nigro dalam Pasolong (2007:21) mendefinisikan administrasi publik adalah:

- (1) Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,
- (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka,
- (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik,
- (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat,
- (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dwight Waldo dalam Pasolong (2007:8), mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Nicholas Henry dalam Pasolong (2007:8), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Dengan demikian setiap orang dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kegiatan Administrasi Publik. M. Irfan Islami (2005:8) menjelaskan sebab-sebabnya antara lain:

- a. Administrasi publik dapat memaksa setiap orang untuk mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku.
- b. Kegiatan yang dilakukan oleh administrasi publik seringkali merupakan kegiatan yang harus diprioritaskan.
- c. Bidang cakupan dan luasnya kegiatan administrasi publik mempunyai ukuran yang tidak terbatas.
- d. Pimpinan puncak administrasi publik bersifat politis (pejabat-pejabat politik) yang dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan kegiatan oleh administrasi publik seringkali sangat sulit diukur tingkat keberhasilan dan efisiensinya.
- f. Masyarakat senantiasa mengharapkan agar administrasi publik dapat memenuhi segala macam kebutuhan mereka.

Lebih lanjut M. Irfan Islami (2005:7) juga menjelaskan Karakteristik Administrasi Publik yaitu:

- a. Administrasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (*service making*).
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat lebih *urgens*.
- c. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat monopoli atau semi monopoli (*no competition*).
- d. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi publik lebih didasarkan kepada undang-undang atau peraturan yang berlaku (*legalistic approach*).
- e. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan administrasi publik tidak dikendalikan oleh harga pasar

- f. Administrasi publik dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak (*social welfare*).
- g. Pelaksanaan dan hasil pelayanan yang dilakukan administrasi publik tergantung pada penilaian oleh rakyat banyak dan meminta pertanggungjawaban publik (*publik accountability*)

2. Peran Administrasi Publik

Peran administrasi publik dalam suatu Negara sangat vital. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Karl Polanyi dalam Pasolong (2007:8) mengatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik. Selanjutnya Frederik A. Cleveland dalam Pasolong (2007:8) kepada dinamika administrasi publik sangat vital dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurut beliau, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan eektivitas, dan lebih menguntungkan bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga apa yang disebut "*organized democracy*".

Gray dalam Pasolong (2007:8), menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- (1) Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan,
- (2) Administrasi Publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia,
- (3) Administrasi Publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan jaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Keban dalam Pasolong (2007:8), menjelaskan bahwa peran administrasi publik dapat diamati secara jelas dari dinamika pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan menteri dan semua jajaran dalam jabatannya,

pengaturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan / pemilihan dan pemberhentian para gubernur, bupati dan walikota, serta semua sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor pada tingkat lokal. Peran tersebut dapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti, menteri dan semua pejabat eselon yang ada di pusat atau di daerah tidak memadai, penggantian struktur dan fungsi birokrasi mulai dari pusat sampai di daerah secara tidak responsif. Pengaruh negatif yang paling dirasakan terjadi ketika berbagai kesalahan dalam pengaturan struktur organisasi publik, proses manajemen dan kebijakan publik yang kurang rasional, serta rendahnya etika dan moral birokrat. Pada umumnya di Negara berkembang peran negatif administrasi publik masih tampak dan menjadi salah satu sumber keterbelakangan .

Peranan administrasi publik pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.

B. Administrasi Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah pada pasal Ketentuan Umum disebutkan sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa pendulum kekuasaan bergeser kembali menjauh dari DPRD menuju keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat dan tidak dapat diberhentikan oleh DPRD ,

namun DPRD mempunyai tiga fungsi yang cukup kuat yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, tampaknya pendulum kekuasaan memang sedang bergerak ke titik *equilibrium* antara dua kekuatan (Muluk,2006:145). Para pembuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menghilangkan istilah badan eksekutif daerah bagi Pemerintah Daerah dan badan legislatif daerah bagi DPRD. Meskipun demikian, istilah Pemerintah Daerah tetap menunjuk pada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Kini DPRD dan Kepala Daerah disebut sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai terjemahan dari *local government* atau *local authorities*.

Kata “Pemerintah” atau “Pemerintahan”, berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terdapat beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, diantaranya:

- a. Adanya “keharusan”, menunjuk kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang member dan yang menerima perintah
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang member dan yang menerima perintah
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah

Sedangkan “Pemerintah Daerah” merupakan badan yang menyelenggarakan tugas-tugas untuk pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah.

Josep Riwu Kaho (1982:20), mendefinisikan Pemerintah Daerah (*local government*) adalah :

Bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.

Landasan dasar pembentukan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1, yang berbunyi:

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan

Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peranannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pandangan tradisional tentang pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, "*wealth of Nations*" bahwa "pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan jauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti". Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat diluar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Akan ada *equilibrium* sebagai titik temu antara permintaan dan penawaran sehingga setiap pihak akan mencapai kepuasan maksimum.

Kini, kondisi tersebut tentu tidak dapat dipertahakan lagi karena kelemahan mekanisme pasar dalam memberikan layanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menuntut untuk dipenuhi. Menghadapi persoalan tersebut, masyarakat menuntut pemecahannya dari pemerintah. Peran pemerintah diperluas tidak lagi sekedar pertahanan, pengadilan, dan polisional belaka. Musgrave dan Musgrave (dalam Muluk, 2006:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah

berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public good*. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Sedangkan fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

3. Model Peran Pemerintah Daerah

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan lebih cepat dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, maka model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.

Leach, Steward, dan Walsh (dalam Muluk, 2006:64-67) mengungkapkan alternatif perubahan dari model *traditional bureaucratic authority* tersebut menuju tiga model alternatif yang dinilai lebih ideal, yakni: *residual authority*, *market-oriented enabler*, dan *community-oriented enabler*. Ketiga model ini bermuara pada konsep yang sama yakni *enabling authority*. Konsep ini sangat memusatkan perhatian pada pemisahan antara produksi dengan penyediaan layanan. Ia berkaitan pula dengan upaya menemukan cara baru dalam pemberian layanan melalui agen-agen di luar pemerintah itu sendiri.

The residual enabling authority menggabungkan penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang lemah dan berdiri di atas bentuk demokrasi yang netral, baik terhadap bentuk *representative democracy* maupun *participatory democracy*.

The market-oriented enabling authority merupakan kombinasi dari penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang kuat disertai penekanan pada demokrasi partisipatif. Seperti halnya *residual*

authority, model ini mengutamakan pasar dalam urusan pemerintah daerah, namun berbeda dalam *starting-pointnya*.

The community-oriented enabling authority merupakan gabungan dari penekanan pada demokrasi partisipatif yang kuat, atau setidaknya tidaknya ada diposisi tengah dalam hubungannya dengan *weak or strong local governance*, serta penekanan antara sektor publik dengan pasar. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan penduduk yang beragam dengan menggunakan saluran penyediaan layanan apa saja yang dipandang paling tepat.

C. Teori *Governance* dan Kemitraan

1. Teori *Governance*

a. Pengertian *Governance*

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat (UNDP dalam Krina, 2003:5).

Sedangkan Lipchak (2002:2) mendefinisikan *governance*: “*How governance functions and works together with others to make decisions and take action to deal with the needs of its citizens*” (bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat).

Sementara itu, *World Bank* (Bank Dunia) mendefinisikan *governance*, “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” (cara menggunakan kekuasaan Negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan) (World Bank dalam LAN, 2000 : 5).

Perubahan paradigma dari *government* ke *governance* yang lebih menekankan bahwa orientasi administrasi publik saat ini sedang diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan rakyat, selanjutnya membawa pengaruh besar dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya antara lain ditematkannya rakyat pada posisi yang

utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintah (*government*) akan tetapi beralih kepada aspek tata pemerintahan (*governance*)

Institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN dan BPKP, 2000:5). Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Negara sebagai suatu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lainnya di pasar. Sedangkan masyarakat (*society*) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain.

b. Local Governance

Di era desentralisasi, tata pemerintahan yang baik adalah standar minimum bagi pemerintah daerah. Selain itu, tata pemerintahan lokal yang menjalankan desentralisasi membutuhkan lebih banyak kapasitas dan kapabilitas karena tata pemerintah lokal dalam bentuk ini mempunyai kewenangan dan sumber daya yang besar dan untuk memberdayakan kewenangan dan sumber daya tersebut dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas.

Untuk itu diperlukan pembangunan dan reformasi dalam pemerintahan lokal dan masyarakat lokal. Pemerintah daerah sendiri akan sulit untuk mereformasi dirinya sendiri, sementara itu

pembangunan masyarakat lokal sendiri sangat sulit dicapai jika hanya mengandalkan usaha sendiri-sendiri, oleh karena itulah diperlukan suatu hubungan saling membangun antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam penciptaan tata pemerintahan lokal yang baik.

Mengutip Nikawa yang diakses dari <http://rechtboy.wordpress.com> (2008:1) Tata Pemerintahan Lokal mempunyai tahapan perubahan selayaknya evolusi dalam tiga tingkatan yaitu tata pemerintahan lokal responsif, kemudian berevolusi menjadi tata pemerintahan *network*, dan tahapan terakhir adalah tata pemerintahan lokal kemitraan. Lebih lanjut Nikawa menjelaskan:

“The responsive local governance means the good governance of local government. Responsive local governance ought to carry out its duty of responsibility and accountability for local people, and provide the chance of citizen participation. While citizen participation is increasing, local governance begins to change to the network governance.

The network governance is composed of the cooperation and responsiveness of local actors. Local actors are mutually networked and exchange their information among them. The community action group, private company, and NGOs are the actors. Also there is networking among local government and many local actors, which operate to organize the network issue and then policy network in specialized areas. This network functions in the participative decision-making process of local government, which attain more effective and efficient policy outcome.

In the network governance, the actors learn and grow in the governance partnership, providing that the local people acquire maturity as an owner and user of power and control in locality, is characterized by the equal partnership between local actors and government, the cooperation of provision of public services among them, and the effective and efficient use of local resources though this

cooperation. The governance partnership will keep and secure the sustainability of community”

"Pemerintahan daerah yang responsif berarti tata pemerintahan yang baik dari pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang responsif patut untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab dan akuntabilitas bagi masyarakat setempat, dan memberikan kesempatan dan partisipasi masyarakat. Meskipun partisipasi masyarakat meningkat, pemerintahan daerah mulai mengubah ke jaringan pemerintahan. Jaringan pemerintahan terdiri dari kerja sama dan respon dari pelaku lokal. Lokal aktor dan jaringan yang saling bertukar informasi diantara mereka. Tindakan kelompok masyarakat, perusahaan swasta, dan LSM adalah aktor. Juga ada jaringan antara pemerintah daerah setempat dan banyak pelaku yang beroperasi untuk mengatur jaringan maka isu kebijakan dan jaringan di daerah-daerah khusus. Jaringan ini fungsi partisipatif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah, yang mencapai lebih efektif dan efisien hasil kebijakan. Dalam jaringan pemerintahan, aktor belajar dan tumbuh dalam pemerintahan kemitraan, yang memberikan penduduk setempat memperoleh kematangan sebagai pemilik dan pengguna kekuasaan dan kontrol di tempat, yang dicirikan oleh kemitraan yang setara antara pelaku dan pemerintah daerah, kerjasama dari ketentuan layanan publik di antara mereka, dan efektif dan efisien penggunaan sumber daya lokal meskipun kerjasama ini. Pemerintahan kemitraan yang akan tetap aman dan keberlanjutan masyarakat"

Dalam menuju tata pemerintahan lokal, pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya sendiri. Pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat terutama pada era desentralisasi dan harus di transformasikan untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang sesuai dengan tuntutan desentralisasi.

Untuk mencapai tata pemerintahan lokal oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan

organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi finansial pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari pegawai negeri daerah.

Reformasi pemerintah daerah dalam beberapa hal mengadopsi beberapa langkah berikut yaitu pemangkasan biaya, restrukturisasi, privatisasi, indikator pelaksanaan tugas, dan evaluasi kebijakan. Dalam reformasi demikian, elemen yang harus diperhatikan adalah pegawai negeri daerah dan masyarakat lokal. Pengembangan kapasitas dua element tersebut sangat menentukan dalam berfungsinya tata pemerintahan lokal. Demi mencapai pengembangan kapasitas mereka, harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam skema kemitraan di tata pemerintahan lokal.

Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat. Justru inilah yang harus dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.

c. Prinsip *Good Governance*

G. Stoker (dalam Islamy, 2003:72-74) mengemukakan adanya 5 proposisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji konsep *good governance*, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari dalam maupun luar birokrasi pemerintah. Pemerintah perlu membuka pintu dan tidak curiga terhadap eksistensi berbagai institusi pemerintahan, bahkan sebaliknya hal itu bisa dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam mencapai tujuan bersama.

2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak memungkinkan lagi terjadinya trikotomi peran sektor pertama (eksekutif dan legislatif), sektor kedua (swasta), dan sektor ketiga (masyarakat) dalam menangani masalah sosial ekonomi, karena peran tersebut sekarang sudah demikian kabur. Peran ketiga sektor tersebut seyogyanya harus menyatu dan terpadu karena mereka mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama tingginya untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi tersebut.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mengakui adanya saling ketergantungan diantara ketiga faktor diatas dalam peran bersama untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi. Tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak membutuhkan lagi satu kekuatan atau sektor manapun yang dominan yang melebihi perannya atas yang lain, melainkan semuanya berinteraksi dan berinterrelasi serta punya akses yang sama dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan jaringan kerja antar aktor dari ketiga kekuatan (sektor) yang menyatu dalam suatu ikatan yang otonom dan kuat. Institusi-institusi dan aktor-aktor dari ketiga sektor tadi akan menjadi kekuatan yang solid dan dahsyat bila mereka bersedia memberikan dan menerima kontribusi baik sumber-sumber, keahlian, kepentingan, maupun tujuan-tujuan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak perlu semata-mata menggantungkan diri pada arahan, petunjuk dan otoritas pemerintah tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan teknik pemerintahan dari sektor non pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang baik dan benar. Pemerintah perlu mengajak sektor yang lain untuk ikut berperan serta dalam proses kebijakan tersebut. Dan peran pemerintah cukup sebagai *catalysator* dan *enabler*.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*.

Sekretariat pengembangan publik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyatakan setidaknya ada 14 prinsip dalam wacana *Good Governance* yang dirangkum sebagai berikut:

1. Wawasan ke Depan (*visionary*)

Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*)

Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

3. Partisipasi Masyarakat (*participation*)

Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.

4. Tanggung Jawab (*accountability*)

Instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

5. Supremasi Hukum (*rule of law*)

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

6. Demokrasi (*democracy*)

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*professionalism and competency*)

Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

8. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

9. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*)

Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

10. Desentralisasi (*decentralization*)

Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*private Sector and civil society partnership*)

Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce Inequality*)

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (*equity of the law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*)

Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

14. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to Fair Market*)

Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam

daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Sedangkan Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yaitu :

1.Partisipasi (*Participation*)

Syarat utama warga Negara dalam berpartisipasi:

- a. Ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaan
- b. Ada keterlibatan secara emosional
- c. Memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya.

2.Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) maupun sumber daya manusianya (*humanware*).

3.Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4.Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Sektor publik selama ini dianggap tertutup, arogan, dan berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat sebagai konsumen, perlu dilakukan survey secara periodik.

5.Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Aktivitas politik berisi dua hal pokok yaitu konflik dan konsensus. Dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan konsensus. Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat merupakan hasil.

6.Keadilan/kesetaraan (*Equity*)

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan individu berlainan namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.

7. Keefektifan dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*)

Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi pada sektor publik

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban setiap aktivitas menyeluruh kepada publik/masyarakat luas, disamping kepada atasan. Akuntabilitas meliputi:

- a. Akuntabilitas organisasional/administratif
- b. Akuntabilitas legal
- c. Akuntabilitas politik
- d. Akuntabilitas professional
- e. Akuntabilitas moral

9. Visi strategis (*Strategic Vision*)

Perlunya memiliki visi jangka panjang (*long-term vision*), visi jangka menengah (*mid-term vision*) dan visi jangka pendek (*short-term vision*).

Ciri visi yang baik adalah:

- a. Bersifat spesifik
- b. Disusun dalam bahasa sederhana (± 10 kata)
- c. Bersifat terukur
- d. Mungkin untuk dicapai
- e. Mempunyai dimensi waktu tertentu

d. **Pilar-Pilar Good Governance**

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara/Pemerintah
 - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
 - b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
 - c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*
 - d. Menegakkan HAM
 - e. Melindungi lingkungan hidup
 - f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e. Memelihara lingkungan hidup
- f. Menaati peraturan
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Mempengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana *checks and balances* pemerintah
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- e. Mengembangkan SDM
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Dalam menciptakan *good governance* di suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya mengerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada masyarakat dan swasta sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam hal manajemen bencana.

2. Teori Kemitraan

a. Definisi Kemitraan

Kata kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti : 1. Teman; Sahabat. 2. Kawan kerja; pasangan kerja; rekan. Sedangkan kemitraan berarti perihal hubungan (jalanan kerjasama dan sebagainya) sebagai mitra (Poerwadarminta, 1997:661).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan hubungan dan jalinan kerjasama sebagai teman sahabat maupun kawan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kemitraan tidak dapat dipisahkan dengan kerjasama, sebab dalam kemitraan menuntut adanya suatu

jalanan kerjasama. Kemitraan melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berhubungan, demikian pula dalam menjalin suatu kerjasama.

Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dalam menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama (Pamudji, 1985:12). Dalam setiap kerjasama terdapat 3 (tiga) unsur yaitu: 2 (dua) pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama.

Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu kumpulan dari kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras. Dengan demikian, pengertian dasar kerjasama seperti ini juga berlaku dalam tinjauan kita terhadap proses kemitraan.

b. Beberapa Teori Kemitraan

Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain (a) persamaan dan organisasi yang lebih landai, (b) hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti *caring* dan *caretaking*), (c) spiritualitas yang berbasis alamiah, (d) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan (e) persamaan dan keadilan *gender*. (Sumartono, 2005:202)

Ada beberapa model kemitraan dalam organisasi dan resistensi yang menghambatnya. Organisasi hirarki yang lebih landai dan kurang kaku memang perlu diubah menjadi struktur birokrasi yang lebih luwes, inovatif, dan bertumpu pada inisiatif individu-organisasi yang lebih landai. Namun perlu dihindari adanya pemikiran bahwa seolah-olah hirarki dihapus dalam organisasi. Jadi yang penting adalah mengubah bentuk hirarki dominasi ke arah hirarki aktualisasi yang mendukung terbukanya potensi yang lebih besar.

Perubahan dalam peranan manajer, dari peran “polisi” ke arah peranan fasilitator dan memberi dukungan. Masuknya pendekatan ini di

dalam manajemen mendorong kreativitas yang lebih besar. Di samping itu ia mendorong ke arah konseptualisasi ulang tentang sifat kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang.

Power over menjadi *power to/with* yaitu terjadi pergeseran dari dominasi ke kreativitas bersama. *Power over* dirancang baik untuk jalur keluar seseorang bekerja pada hirarki dominasi maupun menjaga diri dari pesaing. Di dalam sistem kemitraan, orientasi terhadap *power to* atau *actualisation power* dan *power with* mendorong ke arah sikap yang sangat berbeda, orang menyampaikan pernyataan bagaimana kita dapat bekerja yang terbaik untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.

Team work (kerja tim) sangat dianjurkan, kerja tim mencerminkan pergeseran dari karyawan-karyawan yang diisolasi yang hanya dihubungkan dengan ban berjalan, ke tim kerja yang saling berhubungan yang bekerja pada tugas-tugas tertentu. Bekerja dalam tim memerlukan perhatian besar terhadap sifat dan kualitas hubungan maupun orientasi yang berfokus pada tugas.

Diversity (keberagaman) dari sudut pandang dominator, keberagaman merupakan ancaman terhadap tata tertib. Sebaliknya, dari perspektif kemitraan, keberagaman merupakan kesempatan untuk menumbuhkan kreativitas yang lebih besar, untuk berbagi perspektif baru, menciptakan hubungan dengan ide-ide baru, dan memberi kemungkinan bagi bersemainya antar generasi.

Gender Balance (Keseimbangan Gender). Di dalam sistem kemitraan, terdapat pandangan sinergis dan holistik tentang identitas, individu-individu tidak terkunci ke dalam peranan-peranan gender yang stereotip dan membatasi, melainkan bebas untuk mengekspresikan seluruh potensinya. Karakteristik mendasar dari sistem kemitraan adalah bahwa mereka seimbang secara gender dan holistik, sementara dalam sistem dominator menciptakan “identitas yang berseberangan.”

Di dalam sistem kemitraan, kreativitas sangat bernilai dan dihargai. Kreativitas kemitraan tidak mengecualikan perubahan-perubahan yang kreatif yang dramatis, sistem tersebut juga mendorong hubungan-

hubungan kreatif dan pendekatan-pendekatan kreatif terhadap masalah-masalah sehari-hari. Kreativitas sehari-hari dalam organisasi dapat mendorong perbaikan terus menerus dan perbaikan kualitas, seperti praktik manajerial baru, penghargaan baru, proses pendidikan baru, bagan organisasi baru dan sebagainya.

Jika organisasi dirancang dengan pemikiran sistemik, perbaikan hidup dan prinsip-prinsip kemitraan, maka diperlukan pergeseran mendasar dalam cara orang berpikir dan merancang organisasi. Disamping itu organisasi memerlukan jenis kreativitas yang perlu dijaga dan didorong oleh model kemitraan: perlindungan yang luas dan belum begitu dimanfaatkan dari kreativitas sosial dan kewirausahaan sosial.

c. Kemitraan di Sektor Pemerintahan

Di dalam tataran praktis di sektor pemerintahan, Chapman et al dalam Sumartono (2005:204) melihat kerja organisasi kemitraan yang ada sebagai *“a surprisingly high number of examples of partnership and joint working activity.”* Ia menemukan ketimpangan dari kerja kemitraan dari kerja kemitraan di wilayah tertentu dari pembangunan pedesaan, dimana salah satunya adalah pembangunan masyarakat, *“There was little evidence of participatory models being deployed to achieve community involvement, with the majority of community involvement being pursued only through representative means. Equally, issues of community empowerment have been barely addressed by the partnership identified.”*

Di dalam pelaksanaannya komposisi kemitraan yang disarankan kepada otoritas lokal terdiri dari:

- a. Lembaga-lembaga pemerintah
- b. Otoritas lokal
- c. Bisnis swasta dan organisasi-organisasi komersial
- d. Kelompok-kelompok masyarakat
- e. Organisasi-organisasi lingkungan
- f. Kelompok-kelompok sukarela, dan

g. Individu-individu pribadi.

Selain itu, Bryden et al dalam Sumartono (2005:205) mengemukakan bahwa keunggulan-keunggulan kemitraan lokal terletak pada:

- a. Persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi pembangunan pedesaan di wilayah tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang tersedia untuk mencapai semua ini
- b. Pertimbangan tentang cara pemberian pelayanan yang lebih efektif, termasuk kerja bersama di antara mitra, penggunaan bersama atas gedung-gedung atau sumberdaya lainnya, dan pendekatan terpadu terhadap pemberian informasi kepada orang-orang setempat
- c. Penyediaan sebuah pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat (*community initiatives*)

Ada beberapa persyaratan bagi keberhasilan kerja kemitraan, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya ia mengajukan pedoman terselenggaranya proses ini, yang meliputi pelatihan semua pihak yang terlibat, penggunaan yang hati-hati bahasa yang digunakan ketika berinteraksi dengan orang-orang setempat, penggunaan contoh-contoh, akuntabilitas dan pemerintahan yang terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan ke dalam tugas-tugas yang mudah dicapai, mendorong masyarakat setempat menjadi sadar informasi, dan adaptasi secara terus-menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru.

D. Manajemen Bencana

1. Pengertian Bencana

Beberapa pengertian bencana dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Kata bencana (*Disaster*) secara etimologis berasal dari kata DIS yang berarti sesuatu yang tidak enak (*unfavorable*) dan Astro yang berarti bintang (*stars*). Dis-astro berarti *an event precipitated by stars* (peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi). *Disaster* (bencana) didefinisikan sebagai kejadian yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dan bersifat sangat merusak. Pengertian ini mengidentifikasi sebuah kejadian yang memiliki empat

faktor utama, yaitu tiba-tiba, tidak diharapkan, bersifat sangat merusak, dan kurang perencanaan (www.wikipedia.org).

Dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu fenomena kegiatan yang berdampak pada kerusakan fisik maupun non fisik sehingga yang membawa dampak buruk bagi sistem kehidupan.

2. Pengertian Bencana Alam di Indonesia

Indonesia dengan luas areal $\pm 1,9$ juta Km² dan 13.677 buah pulau, serta sebaran populasi yang belum merata dengan komplikasi keadaan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu modal dasar pembangunan bangsa dan negara, yang sangat penting dan mendasar dalam rangka untuk menjamin keseimbangan pembangunan.

Dilain pihak, keadaan tersebut di atas secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh negatif bagi kehidupan manusia, selaku penghuni alam semesta ini yang dapat merugikan keadaan demikian ini sudah dapat dikatakan sebagai bencana alam.

Di dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 mengartikan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antar lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Berdasarkan atas besarnya, bencana alam ini dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Bencana alam lokal
- b. Bencana alam regional
- c. Bencana alam nasional

Bencana alam lokal dan regional adalah suatu bencana alam yang tidak begitu besar, yang pada umumnya tidak berpengaruh pada areal yang lebih

luas dan dapat dikendalikan dan ditanggulangi secara lokal oleh petugas-petugas di tingkat kabupaten dan atau propinsi. Bencana alam nasional adalah suatu bencana alam yang cukup luas, dan sulit untuk dikendalikan dan ditanggulangi secara lokal maupun regional dan perlu mendapat bantuan dari pusat.

Berdasarkan atas asal-usulnya, bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Bencana alam akibat proses alami

Bencana alam ini dapat diartikan sebagai suatu bencana yang timbul pada manusia dan jasad hidup lain akibat proses biologis, fisika, dan kimia yang terjadi dari inti bumi sampai ke permukaan kerak bumi.

Proses-proses ini dapat terjadi secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Adapun bencana yang tergolong dalam klasifikasi ini adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, serangan hama dan penyakit tanaman, kekeringan, banjir lahar, angin ribut, dan lain-lain.

b. Bencana alam akibat perbuatan manusia

Bencana ini merupakan bencana yang dihasilkan dari tindakan secara langsung maupun tidak langsung manusia. Umumnya terjadi dengan sangat mendadak, dan dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Sehingga masyarakat yang mengalami dan terkena bencana, perlu melakukan tindakan untuk menghadapi dan menanggulunginya. Pemanasan global yang berhubungan dengan peristiwa kekacauan iklim jika dirunut juga akhirnya mengacu pada perbuatan manusia.

3. Penanggulangan Bencana

UNDP dalam Tinjauan Umum Manajemen Bencana (1992:40) tentang bencana banjir:

a. Fenomena sebab akibat terjadinya banjir

Banjir bandang yang terjadi secara alami, banjir sungai dan banjir pantai dari curah hujan yang tinggi atau banjir yang terkait dengan pola-pola cuaca musiman. Manipulasi manusia terhadap batas air, kolam-kolam drainase dan tanah dataran.

b. Karakteristik umum

Banjir bandang: peluncuran air bagian atas yang cepat, gagalnya bendungan, pecahnya hambatan es. Banjir sungai: penguatan yang lambat, biasanya musiman dalam sistim sungai. Banjir pantai: terkait siklon tropis, ombak tsunami, gelombang badai. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya: kedalaman air, durasi, velositas, tingkat pasang, frekuensi kemunculannya, keteraturannya.

c. Bisa diramalkan

Ramalan banjir tergantung pada pola-pola musiman, kapasitas kolam drainase, pemetaan tanah dataran, survey lewat udara dan daratan. Peringatan mungkin akan baik dilakukan sebelumnya untuk banjir musiman, tetapi hanya beberapa menit sebelumnya dalam kasus gelombang badai, banjir bandang, atau tsunami

d. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap kerentanan

Lokasi tempat hunian ada pada tanah dataran (endapan). Pengurangan kapasitas serapan dari tanah (erosi, beton). Bangunan-bangunan dan pondasi yang tidak tahan terhadap banjir. Elemen-elemen infrastruktur yang beresiko tinggi. Stok pangan dan tanaman yang belum dipanen yang tidak terlindungi. Kapal nelayan dan industry-industri kelautan.

e. Pengaruh-pengaruh khusus yang merugikan

Kerusakan fisik: bangunan yang rusak karena hanyut, yang menjadi kebanjiran, runtuh, pengaruh dari puing yang mengapung, tanah longsor karena tanah sudah jenuh, kerusakan lebih banyak di bukit daripada di daerah yang terbuka. Korban dan kesehatan umum: kematian karena hanyut tetapi hanya sedikit yang cidera, kemungkinan munculnya wabah malaria, diare, dan infeksi karena virus. Cadangan air: kontaminasi sumur dan mungkin air tanah, Air bersih mungkin tidak tersedia. Tanaman pangan dan cadangan makanan: panen dan stok pangan mungkin hilang karena banjir, Binatang, alat-alat pertanian dan bibit mungkin hilang, Pemetaan tanah dataran, kontrol penggunaan tanah.

f. Tindakan pengurangan resiko yang memungkinkan
Kontrol banjir (kanal, tanggul, waduk penahan banjir, kontrol erosi)

g. Tindakan kesiapan khusus

Deteksi banjir dan sistim peringatan, partisipasi masyarakat dan pendidikan, pengembangan rencana induk untuk manajemen tanah dataran.

h. Kebutuhan umum pasca bencana

SAR, bantuan medis, penilaian bencana, persediaan air dan makanan jangka pendek, purifikasi air, pengawasan epidemologis, tempat berteduh sementara.

i. Alat-alat penilaian dampak

Formulir survey dampak dan survey udara

Fenomena Bencana atau *Disaster* adalah suatu peristiwa yang dapat disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, yang pada umumnya terjadi secara sangat mendadak, dan dapat menimbulkan dampak yang relatif merugikan. Sehingga masyarakat yang mengalami dan terkena bencana, perlu melakukan tindakan untuk menghadapinya dan menanggulangnya. Upaya tersebut dikenal dengan istilah Penanggulangan atau Penanganan Bencana atau *Disaster Management*, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus yang meliputi sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dibentuklah suatu manajemen bencana yang berarti suatu langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama NGO dan masyarakat dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan cepat.

Manajemen bencana adalah sebuah siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Justru saat tidak terjadi bencana merupakan kesempatan untuk menyusun aktivitas manajemen bencana yang lebih baik. Kenyataannya, manajemen bencana baru menjadi

topik pembicaraan setelah bencana terjadi, kemudian dilupakan sampai saat bencana berikut terjadi kembali (www.mediacenter.or.id)

Penerapan *Disaster Management*, perlu kiranya menetapkan pola dari siklus penanggulangan bencana yang berlaku secara umum, guna memudahkan untuk dilakukan upaya perumusan analisis dari persepsi dan sudut pandang yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa *The Disaster Cycle* adalah suatu wacana visual untuk memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang berbeda, dalam melakukan usaha penanggulangan bencana mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah manusia (Bakornas PBP; Sistem Informasi Penanggulangan Bencana, 2000)

Gambar 1
Siklus Manajemen Bencana menurut Stephen Ambrose, Shahid, Rodney Mc. Kellip



Sumber: (Proyek NASA, Edisi 2005)

Manajemen bencana terdiri dari beberapa proses, diantaranya:

Response (Tanggap Darurat) — *Minimizing the hazards created by an emergency*, yang berarti adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Recovery (pemulihan) — *Returning the community or environment to normal*, artinya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Mitigation (Mitigasi) — *Minimizing the effects of a disaster*, yang berarti serangkaian upaya untuk *mengurangi* risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Preparedness (kesiapsiagaan) — *Planning how to respond to a disaster*, yang berarti serangkaian *kegiatan* yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan

mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak bencana yang terjadi.

Menurut UNHCR (Pola penanganan korban bencana sosial di Indonesia, 2004: 17-18), manajemen penanggulangan bencana yang baik bergantung pada pengetahuan mengenai pola-pola dan tindakan-tindakan yang efektif yang dapat diambil untuk menanganinya. Keadaan darurat tidak harus selalu berakhir dengan tragedi. Kemungkinan terjadinya hal ini dapat dikurangi jika keadaan daruratnya ditangani dengan baik sejak dari tingkat kesiapan sampai perkembangan selanjutnya. Fungsi-fungsi manajemen tertentu menjadi penting dalam kondisi dan situasi bencana, yaitu:

a. Memimpin

Memimpin adalah proses yang membentuk dan mengkomunikasikan visi mengenai operasi keadaan darurat, dengan memeberikan arahan strategik yang jelas sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diambil dalam keadaan-keadaan dengan tingkat ketidakpastian dan resiko yang tinggi sekalipun. Manajemen yang berhasil membutuhkan kepemimpinan.

Kepemimpinan berarti, sekalipun keputusan sudah diambil, keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan baik.

b. Merencanakan

Merencanakan adalah melaksanakan proses penilaian keadaan, menentukan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang dan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapainya. Perencanaan penting dilakukan baik sebelum maupun sesudah keadaan darurat, dan perencanaan operasi harus didasarkan pada kebutuhan yang terinci dan penilaian akan sumberdaya.

c. Mengatur dan mengkoordinasikan

Mengatur dan mengkoordinasikan adalah membangun sistem dan mekanisme untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan mengkoordinasikan orang-orang serta organisasi-organisasi agar mereka dapat bekerjasama secara logis untuk mencapai tujuan bersama.

d. Mengawasi dan mengevaluasi

Mengawasi dan mengevaluasi adalah kegiatan pengawasan terhadap semua kegiatan dan mengevaluasi kinerja serta membandingkannya dengan perencanaan dan melakukan perubahan jika diperlukan.

Selain fungsi-fungsi di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dijabarkan dalam pengorganisasian operasi penyelamatan yaitu:

- a. Tingkat-tingkat kewenangan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan
- b. Jalur-jalur komunikasi antar bagian
- c. Peran yang jelas bagi tiap kelompok, atau bagi tiap orang yang terlibat, termasuk pengalokasian sumberdaya manusia dan material
- d. Kesiapan dalam bentuk pengalaman dan/atau pelatihan
- e. Komitmen terhadap proses-proses yang terus berkelanjutan

Piagam Sphere (2004) dalam Pujiono (2004:45), yaitu Piagam Kemanusiaan dan standar minimum dalam respon bencana disampaikan standar minimum manajemen penanggulangan bencana untuk semua sektor, yaitu:

a. Partisipasi

Penduduk yang terkena bencana secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program bantuan

b. Kajian awal

Kajian memberikan suatu pemahaman tentang situasi bencana dan situasi analisis yang jelas tentang ancaman terhadap kehidupan, martabat, kesehatan, dan penghidupan. Berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang, menentukan apakah dibutuhkan respons dari luar dan kalau memang demikian respons macam apa yang diperlukan

c. Respon

Suatu respon kemanusiaan diperlukan dalam situasi dimana pihak-pihak yang berwenang terkait tidak mampu atau tidak bersedia untuk merespons kebutuhan perlindungan dan bantuan dari penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya, dan bilamana kajian dan analisis menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi

d. Penentuan sasaran

Bantuan atau pelayanan kemanusiaan disediakan secara berkeadilan dan tanpa pilih kasih, berdasarkan pada kerentanan dan kebutuhan dari orang-perorang atau kelompok-kelompok yang terkena bencana

e. Pemantauan

Efektifitas dari program untuk merespons masalah diidentifikasi dan perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas secara terus-menerus dimonitor, dengan tujuan untuk meningkatkan program, atau mengakhirinya sesuai dengan keperluan yang ada

f. Evaluasi

Ada suatu pemeriksaan yang sistematis dan imparsial terhadap tindakan kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk menarik pelajaran demi meningkatkan praktek dan kebijakan dan untuk memperbaiki akuntabilitas

g. Kompetensi dan Tanggungjawab Pekerja Kemanusiaan

Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi yang tepat, sikap, dan pengalaman untuk merencanakan dan secara efektif melaksanakan program dengan tepat

h. Supervise, Manajemen, dan Dukungan terhadap Personil

Pekerja kemanusiaan menerima supervise dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan program bantuan kemanusiaan secara efektif.

Asas-asas dalam penanggulangan bencana menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007:

a. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

b. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian

Asas keseimbangan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

e. Ketertiban dan kepastian hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

f. Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

g. Kelestarian lingkungan hidup

Asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

h. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Dalam Undang-Undang ini lebih lanjut dijelaskan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana antara lain:

a. Cepat dan tepat

Dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi dan keterpaduan

Prinsip koordinasi adalah dalam penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh

berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

d. Berdaya guna dan berhasil guna

Prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Sedangkan prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

e. Transparansi dan akuntabilitas

Prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

f. Kemitraan

Prinsip kemitraan adalah bahwa penanggulangan bencana diperlukan hubungan dan jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan.

g. Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan adalah suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, agar masyarakat dapat melakukan sesuatu berupa pembangunan secara mandiri.

h. Nondiskriminatif

Prinsip nondiskriminasi adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

i. Nonproletisi

Nonproletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

E. Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Memaknai masalah penanganan bencana sebagai sebuah kebutuhan mendasar manusia lahir dari keyakinan bahwa hidup manusia pada hakekatnya adalah berharga dan bermartabat. Bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar (*basic rights*) serta akses yang sama atas sumber-sumber kehidupan. Ditematkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua langkah harus diambil demi mencegah atau meringankan penderitaan manusia baik itu diakibatkan oleh konflik maupun bencana.

Permasalahan disini adalah bagaimana peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk membentuk suatu manajemen bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam menghadapi bencana yang terus melanda di hampir setiap daerah di Indonesia. Namun keberhasilan suatu penanggulangan bencana tidak lepas pula dari peran serta masyarakat secara aktif. Dalam rangka mewujudkan *good governance* maka diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bersama-sama mengatasi bencana.

Sinergi berasal dari kata Yunani *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Hanya dengan bekerja bersama-sama tujuan dapat tercapai secara maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan, sedangkan bersinergi berarti melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi bukan kompromi. Sinergi tidak sama dengan kompromi. Dalam kompromi, pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama.

Siapa pun yang terlibat dalam sinergi harus menerapkan beberapa prinsip dasar berikut agar sinergi yang dibentuk bisa memberikan hasil yang optimal.

1. Kesiediaan untuk saling berbagi.

Dengan saling berbagi ide, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, sinergi bisa dilakukan. Disinilah kekuatan dari sinergi itu dapat ditemukan. Tanpa kesiediaan untuk saling berbagi ini, sinergi tidak bisa terlaksana.

2. Berpikir Menang-Menang.

Dalam bersinergi, tidak ada pihak yang harus kalah dan tidak ada pihak yang harus dirugikan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dapat menikmati kemenangan dan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada jika mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, dalam melakukan sinergi semua pihak harus saling berpikir positif untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk meraih kemenangan

3. Menghargai Perbedaan.

Inti sari dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Karena adanya perbedaan inilah sinergi dimungkinkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan sinergi umumnya memiliki perbedaan keunikan (misalnya: ketrampilan, pengetahuan, pengalaman, kepribadian). Dari perbedaan-perbedaan yang unik inilah kemudian dijalin kerja sama kreatif yang menghasilkan alternatif ketiga yang memberikan keuntungan optimal bagi pihak-pihak yang bersinergi.

Sinergi yang ditunjukkan dalam melaksanakan manajemen bencana merupakan suatu langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama masyarakat dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan cepat yang meliputi proses *respons, recovery, mitigation, preparedness*.

Usaha dan upaya penanggulangan bencana ini telah berkembang dimana kita tidak hanya mengutamakan atau menunggu terjadinya bencana untuk siap memberikan pertolongan, penyelamatan, dan bantuan kepada para korban dan penderita saja, tetapi terutama kita harus mampu mencegah terjadinya bencana, setidaknya mengurangi penderitaan dan kerusakan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, kesiapsiagaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan dan ketrampilan para pejabat pengelola dan petugas atau aparat penanggulangan bencana bersama-sama dengan masyarakat, akan lebih dimantapkan. Begitu pula secara teknis, tenaga-tenaga terampil (*skill*) dimantapkan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sektoralnya.

Upaya penanggulangan bencana di Indonesia secara koordinatif telah digariskan dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Landasan hukum tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan manajemen bencana khususnya di daerah

Dalam menanggulangi bencana peran pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Menurut Undang-undang No.24 tahun 2007 ada beberapa tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam menanggulangi bencana antara lain:

a) Kebijakan Pemerintah

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab Pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- 5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- 6) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- 7) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang Pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
4. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
7. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk meminimalisir bencana yang akan terjadi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini dijelaskan pula tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Hak Masyarakat
 - a Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial
 - e Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya

- f Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
 - g Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - h Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
2. Kewajiban Masyarakat
- a Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Dengan demikian, konsep *good governance* ditunjukkan pula ketika sinergi tersebut terjalin dengan baik. Karena berdasarkan prinsip yang ada dalam konsep *good governance* dimana salah satunya terdapat prinsip kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Prinsip tersebut adalah pembangunan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu. Sehingga, dengan adanya prinsip yang ada dalam konsep *good governance* tersebut diharapkan khususnya pemerintah dapat bekerja sama dengan baik dan terkoordinasi dalam rangka melaksanakan manajemen bencana di daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Arikunto (1990:309) bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala sosial yang ada, yaitu: gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”.

Sedangkan metode kualitatif yang digunakan peneliti, didefinisikan Bog dan Taylor dalam Moleong (1994:3) bahwa: Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara utuh.

Dengan melihat pendapat diatas maka jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti atau dengan kata lain adalah membuat catatan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi.

B Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian dari apa yang akan diteliti sehingga dapat memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Moleong (1994:62-63) mengemukakan bahwa :

Maksud ditetapkannya fokus penelitian ini adalah pertama, penetapan focus dapat membatasi bidang studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk menentukan kriteria-kriteria, inklusi-enklusi atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka fokus penelitian merupakan pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti, sehingga yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam manajemen bencana meliputi :

a. Pada Proses Sebelum Terjadinya Bencana Banjir

i. Operasional Satlak PBP Sebelum Terjadinya Bencana

- 1) Membuat Peta Daerah Rawan Bencana
- 2) Menginformasikan Daerah Rawan Bencana kepada Camat dan Dinas / instansi terkait
- 3) Menyusun SATGAS PBP
- 4) Menetapkan Daerah Alternatif Pengungsian Korban
- 5) Menyusun Program Penanggulangan Bencana

ii. Peran Serta Masyarakat Pada Proses Sebelum Terjadinya Banjir

b. Pada Saat Terjadinya Banjir

i. Operasional Satlak PBP Saat Terjadinya Banjir

- 1) Mengirimkan TRC (Tim Reaksi Cepat) Satlak PBP ke Daerah Bencana
- 2) Menganalisa bencana yang terjadi
- 3) Mengadakan rapat koordinasi Satlak PBP
- 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
- 5) Menyiapkan / mengirimkan Satgas PBP ke Daerah Bencana.
- 6) Menyiapkan dan mengirim bantuan
- 7) Menyiapkan tenaga medis / paramedis, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan bahan makanan yang diperlukan

ii. Peran Serta Masyarakat Pada Saat Terjadinya Banjir

- c. Pada Proses Pemulihan atau Pasca Banjir
 - i. Operasional Satlak PBP Pada Tahap Pasca Banjir
 - 1) Melaporkan jumlah korban dan pemberian jumlah kerugian akibat bencana
 - 2) Melaporkan jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana
 - 3) Mendorong terciptanya situasi yang kondusif kelancaran pemerintah dan pembangunan
 - 4) Mengusahakan perbaikan perekonomian rakyat
 - ii. Peran Serta Masyarakat Pada Proses Pemulihan atau Pasca Banjir

2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam manajemen bencana

Dari pengertian di atas maka dapat dilihat bahwa penetapan suatu fokus pada dasarnya untuk memperoleh informasi secara efektif serta menghindari pengambilan data yang tidak perlu dan tidak sinkron dalam fokus penelitian.

C Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menetapkan pemilihan lokasi di Kabupaten Bojonegoro dengan asumsi :

- a. Kesesuaian dengan substansi penelitian
- b. Mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan deskriptif mendalam.
- c. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama.

Yang dimaksud dengan situs penelitian disini adalah dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya obyek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini. Situs penelitiannya disini adalah terletak pada

1. Kantor Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bojonegoro
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro
3. Kantor Kelurahan Ledok Wetan

D Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2008:82), data adalah keterangan-keterangan suatu fakta mengenai suatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer bisa disebut juga dengan data asli atau data baru. Data primer dapat diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini meliputi pengamatan dan wawancara dengan Dinas-Dinas atau Badan-Badan dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bojonegoro yang terkait dengan penanggulangan bencana serta masyarakat kecamatan Bojonegoro yang menjadi korban bencana banjir.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, arsip, perpustakaan, dan laporan-laporan peneliti terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data sekunder ini bisa disebut juga dengan data yang telah tersedia. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah Laporan kegiatan penanggulangan bencana oleh badan dan dinas terkait serta masyarakat kabupaten Bojonegoro, Laporan

kegiatan lain terkait dengan manajemen bencana, surat kabar atau majalah, makalah atau paper, serta laporan dan hasil penelitian

E Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Adapun teknik-teknik yang digunakan penelitian ini adalah :

a) Observasi

Yaitu: Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung, melihat dari dekat keadaan obyek penelitian. Dengan melakukan observasi, memungkinkan peneliti untuk melihat mengamati sendiri kemudian mencatat keadaan, peristiwa maupun perilaku yang diperlukan dan berkaitan dengan fokus penelitian.

b) Wawancara

Yaitu: Cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan jalan melakukan tanya-jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian.

c) Dokumentasi

Yaitu: cara pengumpulan data sekunder dengan cara mencatat langsung data yang tersedia pada sumber data penelitian berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

F Instrumen Penelitian

Yaitu: Alat yang dipergunakan dalam menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a) Peneliti sendiri

b) Pedoman wawancara, yaitu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung dengan responden.

- c) Catatan lapangan atau alat tulis yaitu catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun pengamatan lapangan.

G Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan agar menjadi lebih sederhana, mudah dipahami dan dapat dipergunakan dalam pemecahan masalah atau dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara jelas. Milles dan Hubberman dalam Abdul Hakim (2001: 48-49), berpandangan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- Reduksi Data (*Data Reduction*), merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang muncul dari catatan penulis di lapangan reduksi. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.
- Penyajian Data (*Data Display*), penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian data, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.
- Menarik kesimpulan atau memverifikasi (*Conclusion Drawing or Verifying*), kegiatan ini mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Inilah yang disebut dengan validitas.

Dengan uraian analisis di atas, maka dalam penyajian data dan analisa nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin di atas, sehingga diharapkan nantinya skripsi yang akan dibuat akan lebih terarah dalam proses pembatasannya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis Dan Luas Wilayah

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada di Wilayah Propinsi Jawa Timur terletak pada posisi $6^{\circ} 59'$ sampai $7^{\circ} 37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 25'$ sampai $112^{\circ} 09'$ Bujur Timur, dengan jarak ± 110 km dari ibu kota propinsi, yang secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Kabupaten Tuban
- Sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Bojonegoro.
- Sebelah Timur Kabupaten Lamongan

Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro sekitar 2.207,06 Km² sama dengan 4,81% Luas Wilayah Propinsi Jawa Timur.

2. Iklim

Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April – Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Nopember – Maret.

Untuk memonitor rata-rata curah hujan yang jatuh, di Kabupaten Bojonegoro tersedia sebanyak 22 buah stasion penangkar hujan yang tersebar di 16 Kecamatan. Dari pantauan tersebut, tercatat jumlah hari hujan di Kabupaten Bojonegoro pada periode 3 tahun terakhir sejak tahun 2004 tercatat sebesar 60 hari, pada tahun 2005 naik menjadi 64 hari dan pada tahun 2006 turun lagi menjadi 61 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan yang dimonitor oleh 16 stasion pengangkar hujan diatas, menunjukkan adanya keterkaitan dengan jumlah hari hujan. Tercatat, rata-rata curah hujan pada tahun 2004 sebanyak 106 mm, tahun 2005 naik sebanyak 146 mm dan pada tahun 2006 turun sebanyak 120 mm.

3. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah Selatan (pegunungan Kapur Selatan) dan Utara (pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur.

Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25 m – 500 m dari permukaan laut dengan kemiringan rata-rata mencapai kurang dari 2%, serta dengan curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata yaitu berkisar antara 1.500 mm – 2.500 mm pertahun. Secara garis besar, gambaran luas wilayah menurut permukaan/kemiringan tanah, disajikan pada tabel 1 berikut

Tabel 1

Luas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Menurut Kemiringan Tanah

No.	Kemiringan Tanah (%)	Luas (Ha)	(%)
1.	< 2%	127.109	55,10
2.	2% -14,99%	83.429	36,16
3.	15% - 39,99%	17.312	7,50
4.	> 40%	2.856	1,24
	Jumlah	230.706	100

Sumber data: Bojonegoro Dalam angka Tahun 2007

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh kemiringan kurang dari 2% sebesar 55,10%, adapun kemiringan diatas 40% sebesar 1,24%.

Ketinggian tempat diatas permukaan laut juga merupakan faktor yang menentukan perubahan iklim suatu wilayah, sehingga sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha dibidang pertanian. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Luas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Menurut Ketinggian Tempat

No.	Ketinggian Tempat (M dpl)	Luas (Ha)	(%)
1.	< 25 m	43.155	18,71
2.	25 m – 99,99 m	104.629	45,35
3.	100 m – 499,9 m	82.629	35,69
4.	> 500 m	574	0,25
	Jumlah	230.706	100

Sumber data: Bojonegoro Dalam angka Tahun 2007

Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya berupa Grumusol, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3

Luas Areal Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Tanah

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	(%)
1.	Alluvial	46.349	20,09
2.	Grumusol	88.937	38,55
3.	Litosol	50.871	22,05
4.	Medeteran	44.549	19,31
	Jumlah	230.706	100

Sumber data: Bojonegoro Dalam angka Tahun 2007

4. Administrasi

Kabupaten Bojonegoro secara administratif membagi wilayahnya menjadi 430 Desa dan 27 Kecamatan. Diantara 27 Kecamatan ini, Kecamatan yang baru dibentuk adalah Kecamatan Kedewan. Sedangkan Kecamatan-Kecamatan sebelumnya adalah Kecamatan Sekar dan Kecamatan Trucuk. Kondisi luas wilayah Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Tambakrejo yaitu seluas 209.52 Hektar dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Bojonegoro yaitu seluas 25.71 Hektar. Dari 430 Desa di Kecamatan pada Kabupaten Bojonegoro, jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Sumberrejo yaitu 26 Desa, sedangkan Kecamatan Ngambon, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Kedewan jumlah Desanya adalah masing-masing sebanyak 5

Desa. Jumlah Kecamatan di Bojonegoro beserta Luas Wilayahnya bisa dilihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4
Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Balen	60,52
2	Baureno	66,37
3	Bojonegoro	25,71
4	Bubulan	84,73
5	Dander	118,36
6	Gondang	107,01
7	Kalitidu	83,01
8	Kanor	59,78
9	Kapas	46,38
10	Kasiman	51,80
11	Kedewan	56,51
12	Kedungadem	145,15
13	Kepohbaru	79,64
14	Malo	65,41
15	Margomulyo	139,68
16	Ngambon	48,65
17	Ngasem	180,20
18	Ngraho	71,48
19	Padangan	42,00
20	Purwosari	62,32
21	Sekar	130,24
22	Sugihwaras	87,15
23	Sukosewu	47,48
24	Sumberrejo	76,58
25	Tambakrejo	209,52
26	Temayang	124,67
27	Trucuk	36,71
	TOTAL	2.307,06

Sumber: www.bojonegoro.go.id

5. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bojonegoro menurut hasil registrasi penduduk pertengahan tahun 2007 jumlahnya tercatat sebanyak 1.260.953 jiwa kepadatan penduduk 524 jiwa/km, dimana 49% tenaga kerjanya bekerja di bidang pertanian.

Tabel 5

Data Kependudukan Kabupaten Bojonegoro sampai Tahun 2007

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
2000	1.165.501
2001	1.195.394
2002	1.194.161
2003	1.169.326
2004	1.182.137
2005	1.205.445
2006	1.217.873
2007	1.260.953

Sumber: www.Bojonegoro.go.id

Untuk Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan tingkat pendidikan, masih didominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu mencapai 53,84 %, kemudian disusul oleh penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 24,61 % dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 16,30 % dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 5,22%. Sedangkan untuk Jumlah Penduduk Bojonegoro berdasarkan Golongan umur bisa dilihat dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro
Menurut Golongan Umur Tahun 2004-2006**

No.	Kelompok Umur	2004	2005	2006
1.	0-4	96.515	97.056	97.600
2.	5-9	100.525	101.088	101.654
3.	10-14	104.157	104.740	105.327
4.	15-19	111.835	112.461	113.091
5.	20-24	100.087	100.648	101.212
6.	25-29	104.122	104.706	105.292
7.	30-34	103.144	103.721	104.302
8.	35-39	101.370	101.937	102.508
9.	40-44	86.824	87.310	87.800
10.	45-49	67.218	67.595	67.973
11.	50-54	50.211	60.493	50.775
12.	55-59	42.079	42.314	42.551
13.	60-64	42.255	42.491	42.729
14.	65-69	33.399	33.586	33.774
15.	70-74	26.355	26.503	26.651
16.	75+	21.634	21.755	21.877
Jumlah/Total		1.191.730	1.198.404	1.205.116

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bojonegoro sebesar 682.178 jiwa atau sebesar 56.60 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 7

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 – 2005**

No.	Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Pertanian, Perikanan dan Peternakan	6	3.828
2.	Pertambangan dan Penggalian	10	783
3.	Industri Pengolahan	371	17.814
4.	Listrik, gas dan Uap	19	613
5.	Bangunan	7	79
6.	Perdagangan Eceran, serta Rumah Tangga Perhotelan	19	974
7.	Pengangkutan Penimbunan dan Perhubungan	24	1400
8.	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	23	993
9.	Jasa-jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	159	943
Total	2005	638	27.427
	2004	683	27.015
	2003	329	23.225

Sumber: Kabupaten Bojonegoro dalam angka Tahun 2007

Jika dilihat produktivitas antar sektor, dengan membagi nilai PDRB dan jumlah tenaga kerjanya, terutama pada sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan, produktivitas yang tertinggi adalah pada sektor Industri pengolahan dan perdagangan, sedangkan sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas yang kedua setelah industri pengolahan.

Tabel 8

**Jumlah Perkembangan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2004-2006**

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006
1.	Pertanian	290.795	291.014	291.123
2.	Pertambangan	1.903	1.905	1.908
3.	Industri	36.781	36.809	36.837
4.	Listrik	8.003	8.009	8.015

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006
5.	Bangunan	74.162	74.218	74.274
6.	Perdagangan	100.685	100.761	100.837
7.	Perhubungan	8.306	8.312	8.318
8.	Keuangan	4.450	4.453	4.456
9.	Jasa dan Lainnya	68.268	68.319	68.370
Jumlah/Total		593.353	593.800	594.248

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2007

6. Kondisi Perekonomian

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah biasanya dilihat pada tingkat laju perekonomian daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, menunjukkan semakin mantapnya perekonomian daerah tersebut. Gambaran perekonomian suatu daerah biasanya diperoleh dengan menghitung semua jenis produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun) atau yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk tahun 2005, PDRB yang didasarkan pada harga yang berlaku tercatat sebanyak 6.969,1 milyar rupiah atau naik sebesar 18,34% dari tahun sebelumnya, Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya perubahan harga untuk komoditi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Apabila perubahan harga tidak diperhatikan, dan nilai didasarkan pada harga konstan, maka nilai PDRB tersebut adalah sebesar 4,4 triliun rupiah atau naik sebesar 4,91%, dan kenaikan tersebut adalah gambaran dari laju pertumbuhan perekonomian. Dari angka laju pertumbuhan perekonomian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro terus membaik meskipun peningkatan laju pertumbuhannya relatif kecil. Tercatat, laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah 4,20% pada tahun 2003; 3,94% pada tahun 2004; dan 4,91% pada tahun 2005.

Tabel 9

**PDRB Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga
Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2003 – 2005 (Milyar/Milliard Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2003	2004	2005
Pertanian	1.971,6	2.193,8	2.541,8
Pertambangan dan Penggalian	47,6	56,8	72,5
Industri Pengolahan	308,0	347,7	403,5
Listrik, gas dan Air Bersih	44,8	52,1	59,5
Bangunan	167,9	209,8	292,5
Perdagangan, hotel dan restoran	1.186,9	1.334,1	1.606,1
Angkutan dan Komunikasi	318,2	354,5	437,1
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	276,1	325,1	381,0
Jasa-jasa	903,9	1.014,8	1.174,9
Total	5.225,0	5.888,8	6.969,1

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007

Tabel 10

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Tahun 2003 – 2005 (Milyar/Milliard Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2003	2004	2005
Pertanian	1.609,0	1.643,1	1.698,8
Pertambangan dan Penggalian	35,8	39,4	44,5
Industri Pengolahan	244,0	250,5	256,2
Listrik, gas dan Air Bersih	34,9	37,1	39,2
Bangunan	131,2	152,0	177,4
Perdagangan, hotel dan restoran	903,1	942,6	999,8
Angkutan dan Komunikasi	227,9	238,6	246,4
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	215,8	233,3	250,7
Jasa-jasa	673,6	699,1	730,6
Total	5.225,0	5.888,8	6.969,1

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007

Ada 9 sektor perekonomian dalam pembentukan PDRB, yaitu: (i) sektor pertanian; (ii) sektor pertambangan dan penggalian; (iii) sektor industri pengolahan; (iv) sektor listrik, gas dan air bersih; (v) sektor bangunan; (vi) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (vii) sektor angkutan dan komunikasi; (viii) sektor keuangan, persewaan dan jasa; dan (ix) sektor jasa-jasa. Dari ke sembilan sektor tersebut, sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dengan kontribusi 36,47% pada harga berlaku dan 38,23% pada harga konstan, Berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa, masing-masing 23,05% dan 22,50% pada harga berlaku dan 16,86% dan 16,44% pada harga konstan.

7. Potensi Daerah

a. Lahan Pertanian

Kontribusi dari sektor pertanian sangat tinggi sehingga menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai “Lumbung Pangan Propinsi Jawa Timur”. Sektor pertanian merupakan penopang utama pertumbuhan daerah, hal ini dapat diamati dari sisi jumlah penduduk dengan jumlah 1.196.496 jiwa, sekitar 5% bergerak pada lapangan kerja dan usaha dibidang pertanian, dan dari sisi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 46,38% berdasarkan harga yang berlaku dan 44,44 % berdasarkan harga konstan, bila dibandingkan dengan sektor lain masih menduduki ranking teratas.

Komoditas utama di bidang pertanian adalah untuk tanaman pangan meliputi tanaman padi dengan produksi rata-rata 600.000 ton GKP pertahun atau sekitar 300.000 ton beras pertahun, jagung dengan produksi rata-rata pertahun mencapai 90.000 ton pipilan kering, Kedelai dengan produksi pertahun mencapai 55.000 ton ketela basah, tanaman perkebunan meliputi komoditas Tembakau Virginia dengan produksi rata-rata pertahun 6.520 ton daun kering, tembakau jawa produksi 470 ton daun kering / pertahun, Tebu dengan produksi rata-rata pertahun 4.290 ton (Kristal Gula), dan untuk tanaman Hortikultural dengan produksi unggulan adalah buah blimbing dengan sentra di Kecamatan Padang,

salak dengan sentra di Desa wedi Kapas dan pisang raja dengan sentra di Kecamatan Ngasem dan Purwosari.

b. Sumber Daya Hutan

Hutan adalah merupakan sumber kehidupan, karena dari sana kita mendapat air, udara segar, makanan dan sana pula kita dapat beternak, bintang kesayangan, bunga yang indah, obat-obatan dan bahan kimia industri, pendek kata walau hutan bukan segalanya banyak yang membutuhkan sumber dari hutan, untuk itu hutan perlu dilestarikan. Dimusim kemarau airmu tak seberapa dan dimusim hujan air melimpah kemana-mana. Suara Tembang Bengawan Solo yang memberikan warna tentang gambaran Kabupatan Bojonegoro dan melahirkan sebuah makna bahwa banjir bukanlah bencana, namun potensi yang belum terkendali.

c. Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air yang tersedia di Kabupaten Bojonegoro kurang lebih sekitar 67 meter kubik/detik atas dasar curah hujan yang ada pada saat ini dan yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 30-40% atau sekitar 26,8 meter kubik/detik sedangkan untuk kebutuhan rata-rata yang meliputi pertanian (40 meter kubik/detik), industri (8 meter kubik/detik), air bersih/domestik (1 meter kubik/detik) dan kebutuhan lain-lain (1,5 meter kubik /detik). Sumber potensi sumber air baku diperoleh dari air sungai/kali (18 buah), waduk (25 buah), mata air (25 buah) dan embung-embung. Potensi terbesar sumber daya air diperoleh dari Sungai Bengawan Solo (pada musim kemarau disuplai dari waduk gajah Munkur Jawa Tengah) dan dari waduk pacal. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tentang air baku di Kabupaten Bojonegoro adalah melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air pada satuan wilayah Bengawan Solo, pengembangan Solo, pengembangan dan peningkatan waduk pacal dan waduk lapangan serta pembuatan embung-embung.

d. Tambang Minyak Bumi

Tambang Minyak Bumi dan Gas Alam di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat di wilayah Kecamatan Ngasem (Desa Mojodelik, Brabohan, wonorejo) diperkirakan mencapai 126 juta barel. Eksplorasi

yang telah dilakukan dengan 126 sumur yang meliputi 106 sumur produksi, 18 sumur injeksi air dan 2 sumur injeksi gas.

Tambang Minyak Bumi dan Gas Alam dikelola secara tradisional dan mekanis. Penambangan tradisional dikelola oleh masyarakat dengan peralatan sederhana untuk pengambilan minyak (sumur) dengan rata-rata kedalaman 500 meter dan dengan sumur pompa tangan (penemuan baru) dengan kedalaman 28 meter, sedangkan sebagian lagi menggunakan teknologi yang memanfaatkan mesin mobil sebagai penggerak. Jumlah penambang minyak tradisional sekitar 74 (sumur) unit yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kedawan meliputi Desa Wonocolo 44 sumur dengan kapasitas produksi 25.771 liter/hari, Desa Margomulyo 18 sumur dengan kapasitas produksi 12.771 liter/hari dan Desa Beji 12 sumur dengan kapasitas produksi 8.249 liter/hari.

e. **Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat**

Tangan-tangan trampil dengan sentuhan teknologi tepat guna telah dapat merubah sumber daya alam dan limbah menjadi barang industri yang memiliki karakteristik dan pesona yang menarik. Industri kecil dan kerajinan Rakyat di Kabupaten Bojonegoro yang telah berkembang meliputi industri olahan hasil pertanian, hasil hutan dan bahan tambang galian C.

f. **Industri Pertanian dan Perkebunan**

Komoditas pertanian yang merupakan produk unggulan di Kabupaten Bojonegoro, disamping padi, jagung dan kedelai adalah tembakau, mangga, salak, blimbing, dan pisang raja yang pengembangan dan pengolahannya dilakukan melalui pengembangan agrobisnis dan industri hasil olahan pertanian.

Perintisan pengembangan agrobisnis untuk komoditas unggulan adalah salak, di Desa Wedi Kecamatan Kapas, Blimbing di desa Ngringirejo Kecamatan Kalitidu, mangga di Kecamatan Padang, tembakau di Kecamatan Baureno dan sekitarnya, sedangkan untuk pengembangan industri hasil olahan pertanian meliputi ledre pisang raja dengan sentra industri Kecamatan Padangan dan sekitarnya.

Desa Wedi Kecamatan Kapas terletak di arah dari ibukota Kabupaten Bojonegoro dengan jarak kurang lebih 5 Km, desa ini terkenal dengan jarak kurang lebih 5 Km, desa ini terkenal dengan buah salak sehingga sampai sekarang sebutan salak dari Bojonegoro lebih dikenal dengan sebutan salak Wedi. Budidaya tanaman salak di Desa Wedi Kecamatan Kapas adalah merupakan komoditi yang telah dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat dan pada kondisi saat ini komoditi tersebut telah berkembang pada desa sekitarnya.

Salah satu ciri khas tersendiri dari buah di desa Wedi yakni salak jenis menkalin memiliki rasa segar (manis asam) yang banyak diminati konsumen. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melestarikan dan mengembangkan komoditi tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui peremajaan dan pengembangan budidaya yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan budidaya yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan teknologi. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan menjadikan desa Wedi sebagai sentra pengembangan agribis komoditas salak, dan terkait dengan upaya ini dibenahi dan ditingkatkan dan untuk menunjang pengembangan agribis salak, Desa Wedi dikemas menjadi desa wisata yang telah dilengkapi dengan fasilitas wisata kolam pancing. Produksi salak rata-rata pertahun mencapai 22.237 kwintal, dengan panen raya terjadi pada bulan Nopember, desember dan januari, panen sedang terjadi pada bulan Mei, Juni dan panen kecil terjadi pada bulan Pebruari sedangkan masa senggang terjadi pada bulan Agustus.

Komoditi Tembakau merupakan komoditi unggulan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki akses pasar tidak hanya pada lokal Bojonegoro tetapi telah merambah ke pasar nasional dan internasional (*export*). Jenis tanaman tembakau di Bojonegoro dikenal ada dua jenis yakni tembakau virginia dengan sentra produksi di Kecamatan Baureno, Sumberejo, kanor dan sekitarnya.

Untuk jenis tembakau jawa dan sentra di wilayah Kecamatan Temayang dan sekitarnya. Pengelolaan tembakau di wilayah sentra

produk di Kecamatan Baureno dan sekitarnya telah tertata rapi dari proses budidaya, pasca panen dan pemasarannya. Untuk pemasaran, produksi tembakau di wilayah tersebut telah dijadikan sumber bahan baku untuk perusahaan rokok seperti PT Gudang Garam, PT Sampoerna, PT Jarum Kudus dan perusahaan ileh masyarakat adalah berupa daun krosok (daun kering).

g. **Industri Olahan Kayu**

i. Hasil Olahan Kayu

Hasil hutan berupa kayu jati dan kayu rimba serta limbah kayu gergajian, akar (tunggak bahasa jawa) merupakan komoditas yang dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tinggi baik nilai manfaat maupun nilai seni. Komoditas ini telah dikembangkan oleh masyarakat Bojonegoro sebagai usaha industri rumah tangga dengan produk berupa meubel dan barang sovenir. Sentra industri kayu meubel yang telah berkembang antara lain Desa Batokan Kecamatan Kasiman dan sekitarnya merupakan sentra industri meubel dan ukir, desa geneng Kecamatan Margomulyo dan sekitarnya sebagai sentra industri meubel, soevenir dari limbah jati (akar/tunggak) dan desa Semlaran Malo sebagai sentra Industri pembuatan patung sapi dan jenis binatang lainnya.

ii. Bubut Kayu

Kerajinan bubut kayu telah lama ditekuni oleh masyarakat desa Batokan Kecamatan Kasiman yang letaknya pada ujung barat Kabupaten Bojonegoro dan berbatasan dengan Kota Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah. Produksi berupa barang-barang souvenir, ornamen dan aksesoris penghias rumah serta keperluan rumah tangga lainnya. Pengembangan untuk memperkaya perkembangan usaha direkomendasikan pada aspek pemasaran dan pengembangan teknologi madya untuk proses produksi. Prospek pemasarannya telah menjangkau berbagai kota di luar Kabupaten Bojonegoro dan telah merambah ke pasar luar negeri (*export*).

iii. Kerajinan Patung Sapi

Kerajinan patung sapi dan hewan lainnya dengan bahan baku dari hasil hutan (kayu jati) merupakan kerajinan yang memiliki keunikan dan spesifik, karena kerajinan ini diolah melalui tangan-tangan terampil yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan. Sentra industri kerajinan patung sapi terdapat di desa Banaran Kecamatan Malo dan sekitarnya (bagian utara Kabupaten Bojonegoro yang jaraknya kurang lebih 25 Km dari Ibu kota Kabupaten Bojonegoro. Prospek pasar produk telah menjangkau kota-kota di Propinsi Jawa Timur dan propinsi lainnya serta ke luar negeri sebagai bahan souvenir. Pengembangan usaha kerajinan aptung sapi dan hewan lainnya direkomendasikan pada penyediaan bahan dasar kayu jati dan bahan dasar sumber daya alam lainnya.

h. **Industri Gerabah Malo**

Desa rendeng Kecamatan Malo yang berada di tepi Bengawan Solo dengan jarak kurang lebih 25 Km dari ibu kota Kabupaten Bojonegoro kearah barat, merupakan sentra industri gerabah dengan sumber bahan baku dari tanah liat dan produk utama berupa celengan (tempat menabung uang) dengan bentuk meniru bentuk binatang seperti macan, sapi, bebek dan bentuk lainnya yang unik dan spesifik. Jumlah produksi celengan tiap bulan rata-rata sekitar 25.000 buah dengan prospek pasar lokal Bojonegoro dan luar Kabupaten Bojonegoro. Prospek pengembangan diarahkan pada pengembangan diversifikasi dan kualitas produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar global, upaya pengembangan ini dilakukan melalui pengembangan tehnologi skala madya.

i. **Industri Onyx**

Rekahan-rekahan yang mengandung batu Onyx yang berada di gunung kramat di desa jari Kecamatan gondang dan sekitarnya, menempati areal seluas 187,5 hektar dengan volume cadangan 468.750 meter kubik dan tonase sekitaar 1.335.937,5 ton sedangkan gi gunung gajah menempati areal seluas 148 hektar dengan volume 359.000 meter

kubik dan tonase cadangan 997.500 ton. Bahan galian Onyx tersebut memiliki kualitas yang cukup baik karena dari analisa kimia diperoleh kandungan silika sebesar 75,36%. Penduduk setempat telah mengusahakan sebagai usaha kerajinan dengan produk berupa souvenir, ornamen penghias ruang rumah dan perabot rumah tangga dengan prospek pasar selain pasar lokal juga telah menjangkau pasar di luar Kabupaten Bojonegoro. Bahan baku yang diambil untuk kerajinan Onyx sekitar 4.000 Kg pertahun dan untuk pengembangan kerajinan Onyx direkomendasikan pada pengembangan teknologi dan desain produk yang berorientasi kebutuhan pasar, kemasan produk lain serta peningkatan infrastruktur.

j. **Prasarana Transportasi**

Sarana dan prasarana yang membantu transportasi penduduk yang tersedia adalah transportasi darat dan menjadi penghubung antar daerah sentra-sentra produksi pertanian, industri dengan pusat pemasarannya. Prasarana jalan yang terdiri jalan utama yang menghubungkan antara Surabaya dengan kota Bojonegoro. Adalah sepanjang 110 Km, sementara ruas jalan yang menghubungkan antara ibu Kota Kabupaten Bojonegoro dengan ibu kota Kabupaten sekitarnya. (Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Blora, Madiun, Magetan dan Bojonegoro) antara 45 Km hingga 110 Km, status prasarana jalan yang tersedia di Kabupaten ini adalah jalan propinsi sepanjang 45 Km, jalan Kabupaten sepanjang 395 Km dalam kondisi sedang dan jalan sepanjang 167 Km dalam kondisi rusak. Transportasi yang tersedia antara lain bus/taksi antar kota antar Kabupaten (jurusan Surabaya, Tuban, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Jawa Tengah sampai Jakarta) dan angkutan kereta api jurusan Surabaya-Bojonegoro-Jakarta. Sedangkan angkutan lokal yang tersedia antara lain angkutan kota, dokar, becak, perahu dan ojek (sepeda motor) yang merupakan angkutan antar desa/dalam kota. Disamping sebagai angkutan penumpang, kendaraan bermotor digunakan sebagai angkutan barang-barang produksi hasil pertanian, kehutanan dan hasil-hasil lainnya dan barang-barang produksi hasil pertanian, kehutanan dan hasil-hasil

lainnya dan barang-barang kebutuhan lokal. Selain itu tersedia angkutan umum 24 jam dari terminal Rajekwesi Bojonegoro di Jalan Ahmad Yani Lisman Menuju Terminal Oso Wilangan di Surabaya.

k. **Sarana Akomodasi**

Dalam era otonom daerah dimana tiap wilayah dituntut dapat mengembangkan potensi dan kapasitasnya wilayahnya seoptimal mungkin dengan tetap mempertahankan karakter dan kekhasan wilayahnya masing-masing, sektor-sektor ini yang terkait dengan jasa penginapan dan rumah makan. Pada wilayah ini terdapat 8 fasilitas jasa akomodasi berupa hotel di Kecamatan Dander. Keseluruhannya merupakan penginapan dengan kelas melati yang telah menyediakan tempat untuk beristirahat yang layak bagi pengguna jasanya. Bahkan pengembangan fasilitas hotel dan restoran di wilayah Kabupaten ini untuk skala pelayanan yang lebih besar seperti hotel berbintang dan restoran-restoran skala pelayanan internasional telah difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten. Hal ini disujudkan dalam bentuk penyediaan lahan dan kemudahan birokrasi pengurusan usaha ini di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu lahan pengembangan fasilitas ini adalah pada bekas lokasi terminal yang cukup strategis ini adalah pada bekas lokasi terminal yang cukup strategis lokasinya karena memiliki akses yang mudah ke dalam maupun keluar kota Bojonegoro.

l. **Pasar dan Pertokoan**

Perkembangan sebuah wilayah dapat diukur dari perkembangan kegiatan non agraris yang terdapat dalam wilayah urban wilayah tersebut. Begitu juga halnya dengan kota Bojenegoro. Dengan semakin berkembangnya penduduk dan semakin variatifnya kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan primer, sekunder hingga tersiernya maka perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa di kota Bojonegoro ini juga semakin pesat. Berkembangnya pusat-pusat pembelanjaan pada kawasan kota di sekitar alun-alun hingga menjamurnya rumah toko dan mini market pada wilayah kota.

B. Penyajian Data Fokus

1. Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana

a. Pada Proses Sebelum Terjadinya Bencana

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki strategi penanganan Banjir yang dalam pelaksanaannya melibatkan Satlak PBP dan Gugus Tugas. Satlak PBP dan Gugus Tugas saling terkoordinasi untuk mengatasi bencana banjir yang terjadi. Satlak PBP mempunyai tugas-tugas yang disusun dalam Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka upaya penanganan bencana dan pengungsi, baik yang ditimbulkan oleh alam ataupun manusia, maka perlu dibentuk SATLAK PB di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 1 April 2004 sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/43/KEP/412.12/2004 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bojonegoro (Satlak PBP) Tahun 2004.

i. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) pada saat sebelum terjadinya bencana antara lain:

1) Membuat Peta Daerah Rawan Bencana

Peta Daerah Rawan Bencana sangat penting sebagai persiapan ketika memasuki musim penghujan yang diharapkan Pemerintah Daerah maupun Lembaga Lokal seperti Kelurahan dan RT/RW serta masyarakat lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi banjir yang mungkin akan terjadi. Berikut merupakan pernyataan dari Kepala Dinas PU Ir. Andi Tjandra, MM

“Dengan menganalisis karakteristik wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka dapat disimpulkan jenis bencana alam apa yang akan terjadi kemudian membuat peta rawan bencana alam, supaya masyarakat mengetahui tentang daerah-daerah mana saja yang dijadikan kawasan rawan bencana. Sehingga nantinya, Pemerintah Daerah maupun masyarakat mampu melakukan persiapan saat sebelum terjadinya bencana alam” (wawancara tanggal 20 April di Kantor Dinas PU Bojonegoro)

Berikut merupakan Daerah Rawan Bencana di Daerah Kabupaten Bojonegoro.

a) Banjir Bengawan Solo

Wilayah yang terlanda Kecamatan: Margomulyo, Ngraho, Padangan, Kasiman, Purwosari, Malo, Kalitidu, Trucuk, Dander, Bojonegoro, Kapas, Balen, Kanor, dan Baureno.

b) Banjir Sungai

Wilayah yang terlanda Kecamatan: Ngambon, Dander, Kapas, Balen, Sukosewu, Sugihwaras, Gondang, Kedungadem, Kepohbaru.

c) Banjir Bandang

Wilayah yang terlanda Kecamatan: Ngraho, Kedewan, Malo, Ngasem, Sekar, Gondang, Dander, Kapas, Sumberrejo, Kanor, Kepohbaru, Kedungadem.

2) Menginformasikan Daerah Rawan Bencana kepada Camat dan Dinas / instansi terkait

Setelah mengetahui daerah rawan bencana di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Kepala Kecamatan dan Dinas/Instansi terkait agar supaya segera melakukan perencanaan dalam menghadapi bencana banjir yang akan terjadi agar pelaksanaannya menjadi lebih mudah dan terencana dengan baik dan sistematis.

3) Menyusun SATGAS PBP

Pemerintah daerah dalam hal ini SATLAK PBP (Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi) melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Seperti yang dijelaskan oleh Bpk. Maskan Ali yang merupakan anggota dari Satlak PBP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Bojonegoro, di dalamnya telah dibentuk tim-tim yang melibatkan berbagai instansi dalam proses Manajemen Bencana beserta tugas dan operasional pelaksanaannya” (wawancara tanggal 7 april 2009 di kantornya)

Koordinasi Penanggulangan Pada Proses Kesiapsiagaan diatur dalam Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Susunan anggota satlak yang dibagi menjadi (3) tiga Kelompok yaitu Kelompok Kesiagaan Bencana, Kelompok Penanganan Bencana, dan Kelompok Penanganan Pasca Bencana yang masih dibagi menjadi beberapa bidang. Dalam proses Kesiapsiagaan melibatkan Kelompok Kesiagaan bencana yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dengan struktur sebagai berikut:

a) Struktur dari Bidang Penyuluhan

i) Ketua : Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro

ii) Wakil Ketua : Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

- (1) Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
- (2) Kasubdin Pengairan Kabupaten Bojonegoro
- (3) Kadin Hutbun Kabupaten Bojonegoro
- (4) Kadin Kimpraswil Kabupaten Bojonegoro
- (5) Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro
- (6) Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Kabupaten Bojonegoro
- (7) Ketua PWI Kabupaten Bojonegoro
- (8) Kabag Pertambangan dan Energi Setda Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas dari Bidang Penyuluhan antara lain:

- (1) Memberikan penerangan dan sosialisasi tentang bahaya dan bagaimana penanganan bencana yang efektif
- (2) Menginventarisasikan dan menganalisa Peta Daerah Rawan Bencana
- (3) Mengembangkan sistem peringatan bahaya

- (4) Memonitor pelaksanaan peraturan tentang tata guna tanah, syarat keamanan bangunan dan lain sebagainya
- (5) Menginventarisasi kesiapan sarana dan prasarana terhadap kemungkinan terjadinya bencana
- (6) Memberikan iklan layanan masyarakat tentang bahaya dan pencegahan bencana

b) Bidang Mitigasi/Penjinakan

- i) Ketua : Kepala Dinas PU Kabupaten Bojonegoro
- ii) Wakil Ketua : Kabid Penanggulangan dan Kesiagaan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

- (1) Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bojonegoro
- (2) Kasubdin Bina Marga Kabupaten Bojonegoro
- (3) Kadin Hutbun Kabupaten Bojonegoro
- (4) ADM Perhutani Parengan
- (5) ADM Perhutani Bojonegoro
- (6) ADM Perhutani Padangan
- (7) Ka PBSAW Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas dari Bidang Mitigasi/Penjinakan

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait khususnya yang menyangkut masalah penegakan peraturan yang telah ditetapkan, serta pemasangan tanda rambu bahaya/larangan
- (2) Menetapkan lokasi-lokasi pengintaian/pengawasan
- (3) Menginventarisasikan kebutuhan pembangunan sarana pengamanan bahaya dan perbaikan sarana prasarana yang kritis (tanggul, dam, bendungan, sudetan, jalan, jembatan)

c) Bidang Kesiapsiagaan

i) Ketua : Ka Bakesbangpol dan Linmas
Kabupaten Bojonegoro

ii) Wakil Ketua : Kakan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

- (1) Kasat Samapta Polres Bojonegoro
- (2) Kakan PDE Kabupaten Bojonegoro
- (3) Kasubdin Bina Marga Kabupaten Bojonegoro
- (4) Ka Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
- (5) Ka Dinas Hutbun Kabupaten Bojonegoro
- (6) Kasubdin Pengairan Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Kesiapsiagaan antara lain:

- (1) Menyelenggarakan pelatihan, geladi Posko dan geladi Lapangan penanggulangan bencana
- (2) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka menghindari dan menanggulangi bencana
- (3) Mendata kesiapsiagaan dan kemampuan dukungan awal penanganan darurat di Unit Operasional Kecamatan

4) Menetapkan Daerah Alternatif Pengungsian Korban

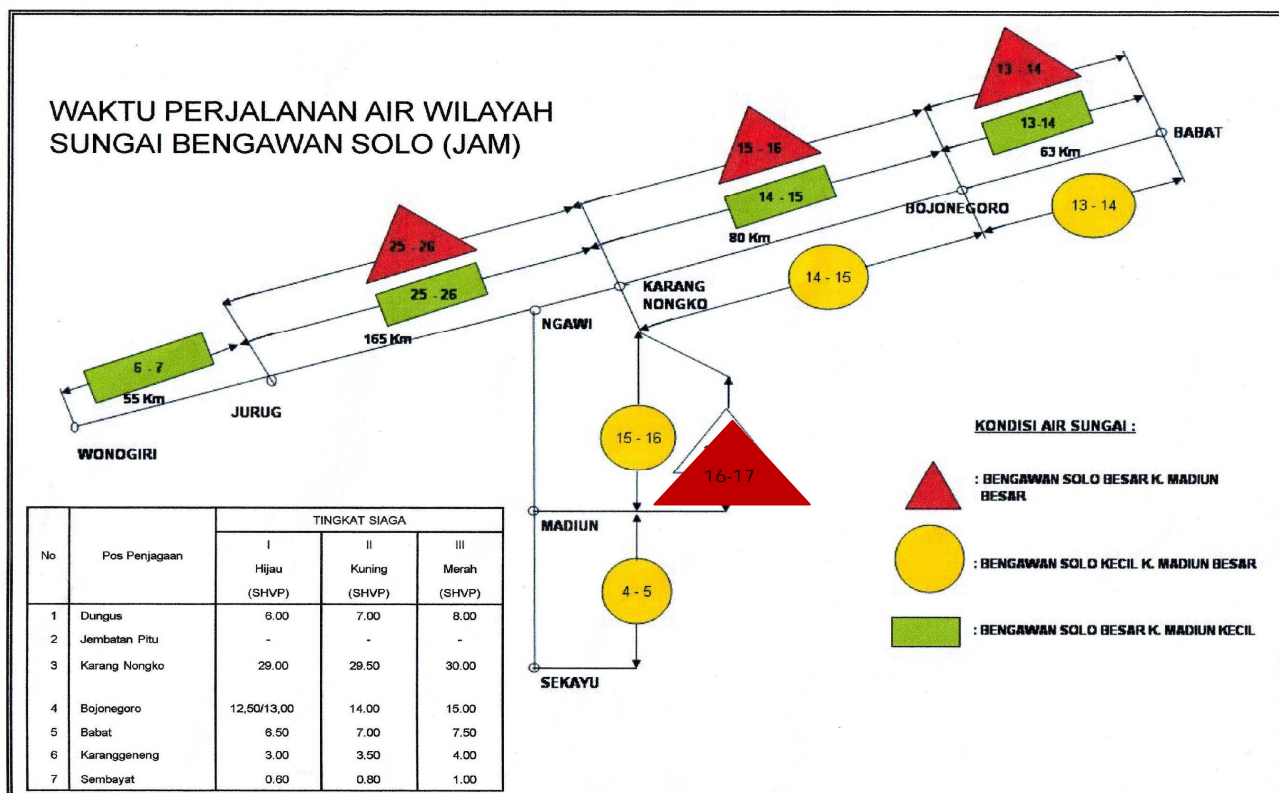
Pemerintah juga menyiapkan daerah atau tempat alternatif pengungsian korban agar memudahkan proses evakuasi. Dalam banjir tahun 2009 ini Pemerintah Kabupaten menyediakan sedikitnya ada 51 titik pengungsian yang tersebar di Kecamatan rawan banjir.

5) Menyusun Program Penanggulangan Bencana

Sebagai persiapan dalam menghadapi bencana bisa juga dilakukan dengan menetapkan status siaga dan menginformasikan perkembangannya kepada masyarakat sekitar. Penetapan status banjir bisa dilihat dari estimasi perjalanan air dari Karangnongko yang bisa diperkirakan waktu terjadinya banjir yang akan terjadi

di Bojonegoro. Gambar 2 berikut merupakan Estimasi Perjalanan Air Sungai Bengawan Solo dalam hitungan waktu (jam).

Gambar 3
Waktu Perjalanan Air Wilayah Sungai Bengawan Solo
(Jam)



Sumber: Dinas PU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009

Dari gambar tersebut maka bisa diprediksikan bencana banjir yang akan terjadi yang terus dipantau. Setelah mengetahui perkiraan datangnya air, maka ditetapkan status siaga supaya Pemerintah Daerah beserta Instansi terkait dan melibatkan lembaga-lembaga lokal dan masyarakat dapat segera melakukan tindakan untuk menghadapinya. Tabel 11 di bawah ini merupakan penetapan tingkat status siaga terhadap banjir.

Tabel 11

Perkiraan Debit Banjir Bengawan Solo dari Karangnongko ke Bojonegoro

No	Tingkat Kesiagaan	TMA Karangnongko	Debit m ³ /det	TMA Bojonegoro	Debit m ³ /det
1	SIAGA I	29.00	1,077.39	13.00	829.50
2	SIAGA II	29.50	1,331.39	14.00	1,404.53
3	SIAGA III	30.00	1,617.53	15.00	2,172.20
4	> SIAGA	30.50	1,936.74	16.00	3,148.21
5	> SIAGA	31.00	2,289.85	16.40	3,599.98

Sumber: Dinas PU Kabupaten Bojonegoro

Untuk penanganannya dikatakan Siaga I adalah ketika ketinggian air di Bojonegoro mencapai 13.00 m. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU Ir. Andi Tjandra, MM tentang tindakan pemerintah dalam mengatasi banjir. Dijelaskan bahwa:

Ketika Siaga I maka Pemerintah dalam hal ini adalah Satlak PBP mengambil langkah-langkah:

- a. Menyiapkan Bahan Banjiran yaitu karung, tanah/pasir, dan papan penutup
- b. Satlak mendirikan posko untuk informasi dari bantaran sungai dan memonitor perkembangan air

1. Personil dan Petugas

Personil yang ditugaskan pada POSKO Penanggulangan Bencana terdiri dari berbagai wakil dari Badan/Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam Organisasi Satlak PBP Kabupaten Bojonegoro.

- a. Penanggung Jawab : Ketua SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro
- b. Pengawas : Para Wakil Ketua SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro
- c. Pimpinan Posko : Sekretaris SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro
- d. Petugas Administrasi : Staf Sekretariat SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro

e. Petugas Komunikasi/Caraka : Staf Sekretariat SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro atau Petugas yang ditunjuk

2. Penggiliran Petugas Posko diatur sebagai berikut:

a. Dilaksanakan 1 x 24 jam dan dimulai pukul 07.00 WIB setiap hari

b. Perintah penunjukan petugas POSKO diatur melalui Surat Perintah Ketua SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro

c. Penggantian Petugas Pengawas, Petugas Administrasi, Petugas Komunikasi/Caraka dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua SATLAK PBP Kabupaten Bojonegoro

d. Jumlah personil dan petugas pada pelaksanaan POSKO sebagai berikut:

a) Penanggung Jawab : 1 (satu) orang

b) Pengawas : 1 (satu) orang

c) Pimpinan POSKO : 1 (satu) orang

d) Petugas Administrasi: 2 (dua) orang

e) Petugas Komunikasi : 3 (tiga) orang

3. Perlengkapan POSKO Penanggulangan Bencana

a. Alat Komunikasi terdiri dari:

a) Telepon

b) Handy Talky (HT)

c) Pesawat VHF

d) Faxsimile

b. Buku Administrasi POSKO meliputi:

a) Buku Serah Terima Petugas

b) Buku Jurnal

c) Blangko / Formulir Berita

c. Peta Kabupaten Bojonegoro

d. Peta Rawan Bencana

e. Simbol / Tanda Bencana

- f. Papan Data Korban Bencana
 - g. Papan Struktur Organisasi
 - h. Papan Diagram Pentahapan Penanggulangan Bencana
 - i. Daftar Inventarisasi Korban
 - j. Papan Daftar Petugas POSKO
 - k. Papan Jurnal Kegiatan / Tabulasi
 - l. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - m. Tempat Tidur / Velbed
 - n. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 1 unit
 - o. Motor Boad (perahu karet) 2 (dua) unit
 - p. Tempat / ruangan termasuk meja kursi
4. Mekanisme Laporan

Untuk bahan evaluasi serta dalam rangka pengambilan langkah-langkah selanjutnya diperlukan adanya laporan dari satuan bawah, dalam hal ini Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan kepada satuan atasan, dalam hal ini SATLAK PBP Kabupaten

a. Laporan Rutin

Sifatnya wajib dan memuat kejadian-kejadian pada saat/hari itu dalam kurun waktu 24 jam dengan ketentuan pengiriman sebagai berikut:

- 1) Laporan pertama dikirim pukul 07.00 WIB
- 2) Laporan kedua dikirim pada pukul 15.00 WIB
- 3) Laporan ketiga pada pukul 20.00 WIB

b. Laporan Insidental

Bersifat wajib dan memuat kejadian yang menonjol/ penting/ segera serta perlu penanganan/tindak lanjut cepat, sedangkan waktu pengirimannya adalah pada kesempatan pertama (sewaktu-waktu). Laporan disampaikan lewat peralatan komunikasi yang telah tersedia pada Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Kecamatan lokasi bencana, disusul dengan laporan tertulis secepatnya.

Dikatakan Siaga II ketika ketinggian air mencapai 14.00 m. Lebih Lanjut dikatakan oleh Kepala Dinas PU ketika Siaga II Pemerintah Daerah harus menyiapkan perangkat untuk evakuasi warga yaitu perahu karet, relawan, makanan dan bantuan lain serta dapur umum.

Untuk Siaga III adalah ketika Ketinggian Tinggi air mencapai 15.00 m. Setelah status dikatakan Siaga III maka dapur umum mulai bekerja (PMI) atau oleh Satlak di tingkat Kecamatan, kemudian mempublikasikan kebutuhan bantuan kepada para pengungsi sehingga bantuan akan segera dikirimkan ke pengungsian.

Jika ketinggian air sudah mencapai lebih dari 15.00 M, maka pada saat itulah dikatakan Kondisi Bencana / darurat. (wawancara tanggal 20 April di Kantor Dinas PU Bojonegoro)

Berikut merupakan contoh pelaporan data ketinggian air saat saat bencana banjir terjadi mulai tanggal 25 Februari 2009 sampai tanggal 3 Maret 2009

Tabel 12
Data Ketinggian Air

No	Tanggal	Jam	Ketinggian air		Babat
			Karangnongko	Bojonegoro	
1	25-02-2009	00.00	27.05	15.00	
		01.00	28.95	15.01	
		02.00	29.35	15.02	
		06.00	27.38		
		07.00		15.10	
		09.00	27.70	15.14	
		10.00		15.16	
		11.00		15.17	
		12.00	27.86	15.19	
		13.00		15.20	
		14.00		15.21	
		15.00	28.08		
		18.00	28.24		8.00
		19.00	28.24	15.21	8.00
		21.00	28.36	15.22	8.07
	23.00		8.09		
2	26-02-2009	08:00	29.12	15.29	8.23

No	Tanggal	Jam	Ketinggian air		Babat
			Karangnongko	Bojonegoro	
		12:00	29.25	15.34	8.35
		13:00	29.27	15.35	8.35
		14:00	29.30	15.37	8.37
		17:00	29.35		8.40
		18:00	29.36		8.39
		19:00	29.39		8.42
		20:00	29.42	15.39	8.44
		21:00	29.44	15.40	8.46
		22:00	29.50		8.47
		23:00	29.56	15.41	8.48
3	27-02-2009	00:00	29.62		8.49
		02:00	29.74	15.40	8.47
		08:00	29.97	15.40	8.51
		10:00	29.97	15.40	8.57
		11:00	29.96	15.40	8.58
		13:00	29.92	15.42	8.58
		14:00	29.91	15.43	.60
		15:00	29.89	15.43	8.61
		15:15		15.44	
		16:00	29.87	15.46	
		17:00	29.84	15.46	8.64
		18:00	29.81	15.48	.66
		19:00	29.79		
		20:00	29.77	15.49	8.68
		21:00	29.70		
		22:00	29.64	15.50	8.70
		23:00	29.59		8.71
4	28-02-2009	00:00	29.54	15.51	8.72
		09:00	28.93	15.52	8.81
		12:00	28.17	15.52	8.84
		14:00			8.86
		17:00	27.71	15.54	8.89
		19:00	27.30	15.51	8.91
		22:00	26.95	15.44	8.94
		00:00		15.37	
5	1-3-2009	09:00	25.44	14.87	8.70
		11:00		14.71	
		12:00	25.20	14.61	
		18:00	24.96	14.13	8.62
		21:00	24.72	13.75	8.57
		22:00		13.64	8.56
		23:00		13.56	8.55

Sumber: Satlak PBP Kabupaten Bojonegoro

ii. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki strategi penanganan Banjir selain Satlak PBP, yaitu Gugus Tugas. gugus Tugas terdiri dari Gugus Tugas Pengendali Air dan Gugus Tugas Tindak Sosial:

- 4) Tugas Gugus Pengendali Air
 - a) Penyiapan Bahan Banjiran
 - b) Koordinasi dengan dinas instansi terkait
 - i) Balai Besar Bengawan Solo
 - ii) Balai Pengendali Sungai se Jatim
 - iii) Dinas Kominfo
 - c) Monitoring terhadap kondisi tanggul kota
 - d) Penyiapan bahan banjiran di lokasi tanggul kota
 - e) Memberikan info secara rutin kepada masyarakat tentang ketinggian muka air, kondisi curah hujan, dan Kewaspadaan terhadap banjir.
 - f) Kesiapsiagaan pompa pengendali banjir
- 5) Tugas Gugus Tindak Sosial
 - a) Sebelum Banjir
 - i) Melakukan Pemantauan gerak air
 - ii) Koordinasi dengan dinas instansi terkait
 - iii) Buat prediksi tentang gerak air
 - iv) Beri informasi kepada masyarakat (on air lewat radio)
 - b) Saat Banjir
 - i) Evakuasi korban
 - ii) Penanganan Pengungsi
 - iii) Pelayanan Kesehatan
 - iv) Pendistribusian Bantuan
 - c) Pasca Banjir
 - i) Layanan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
 - ii) Melaksanakan kebersihan
 - iii) Melaksanakan rehabilitasi

iii. Peran Serta Masyarakat Pada Proses Sebelum Terjadinya Banjir

Guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mulai tingkat Desa/Kelurahan, maka perlu diatur mekanisme dalam suatu sistem yang dapat mendorong kemandirian dalam keswadayaan Masyarakat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan melakukan berbagai upaya antisipasi dan Partisipatif secara terpadu melalui swadaya masyarakat dengan berkoordinasi dengan Lembaga Lokal yaitu RT/RW dan Kelurahan

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Namun, kemampuan masyarakat sangatlah terbatas sehingga diperlukan pengarahan dari pemerintah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU Ir. Andi Tjandra, MM.

“Sebenarnya masyarakat sudah terlibat secara aktif tinggal pemerintah yang mengarahkan masyarakat. Dulu Pemerintah sebagai pelaksana sekarang masyarakat seluruhnya dilibatkan pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator.” (wawancara tanggal 20 april 2009 di Kantor Dinas PU Bojonegoro)

Dalam proses kesiapsiagaan masyarakat juga melakukan persiapan yaitu:

1) Ketika memasuki musim penghujan masyarakat membuat tempat tinggi baik yang permanen yaitu dari tembok maupun tidak permanen yaitu dari kayu untuk mengantisipasi banjir sewaktu-waktu yang siap mengancam tempat tinggal mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Bpk. Mohamad Yasir, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Ledok Wetan berikut ini.

“Masyarakat membuat umpak yaitu tempat yang tinggi bisa terbuat dari kayu atau tembok yang berfungsi untuk mengantisipasi banjir sewaktu-waktu terutama untuk menyelamatkan barang mereka”. (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

2) Masyarakat telah mempersiapkan tempat-tempat darurat yang digunakan sewaktu-waktu untuk mengungsi ketika banjir datang.

Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Bpk. Mohamad Yasir

“Biasanya mempunyai tempat darurat yaitu ke tetangga yang terdekat atau ke jalan yang lebih tinggi yaitu Jalan Kapten Ramli dan di Gedung Serba Guna. Jika melebihi tempat darurat maka masyarakat akan mengungsi” (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

3) Mengungsi jika melebihi tempat darurat yang dipersiapkan.

Menurut Bpk. Mohamad Yasir

“Jika melebihi kapasitas dari tempat-tempat darurat masyarakat sini akan mengungsi ke tempat yang telah disediakan pemerintah ataupun di rumah sanak keluarga mereka yang mereka anggap aman” (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

Peran Lembaga masyarakat Lokal yaitu RT/RW dan Kelurahan yang merupakan penggerak Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat sangat berpengaruh besar sebab mereka mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat lokal. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menangani bencana karena masyarakat merupakan korban yang utama dari bencana banjir yang terjadi mulai dari tahap pencegahan, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Ledok Wetan Bpk. Mohamad Yasir, S.Sos yang menyatakan bahwa

“Banjir di Bojonegoro terjadi setiap tahun, untuk itu koordinasi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan bukan hanya antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat saja, namun perlu adanya kerjasama juga dengan Lembaga Lokal yaitu Kelurahan dan RT/RW juga berperan penting dalam usaha menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi dan menanggulangi banjir”. (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

Upaya yang dilakukan pihak kelurahan dalam proses sebelum terjadinya bencana sesuai dengan pernyataan dari Bpk. Mohammad Yasir antara lain:

- a) Memecahkan solusi bersama dengan Pemerintah Kabupaten
 - b) Membantu meringankan dengan meminta bantuan warga yang mampu untuk member bantuan (sembako)
 - c) Berupaya untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga non pemerintahan (swasta) maupun pengusaha atau simpatisan.
 - d) Kesehatan dari masyarakat terus dipantau dengan menyediakan pengobatan gratis.
- (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

b. Pada Saat Terjadinya Bencana

i. Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Pada Saat Terjadi Bencana:

- 1) Mengirimkan TRC (Tim Reaksi Cepat) Satlak PBP ke Daerah Bencana
- 2) Menganalisa bencana yang terjadi
- 3) Mengadakan rapat koordinasi Satlak PBP
- 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
- 5) Menyiapkan / mengirimkan Satgas PBP ke Daerah Bencana. Satuan tugas yang ada dalam Kelompok Penanganan Bencana antara lain:

- a) Bidang SAR (*Search and Rescue*)
 - i) Ketua : Kasi Ops / Ter Kodim 0813 Bojonegoro
 - ii) Wakil Ketua : Kasat Samapta Polres Bojonegoro
 - iii) Anggota-anggota :
 - (1) PMI Kabupaten Bojonegoro
 - (2) Satpol PP Kabupaten Bojonegoro
 - (3) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang SAR

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait khususnya yang menyangkut masalah penyelamatan dan keselamatan para korban bencana alam dan pengungsi utamanya pada saat-saat krusial
- (2) Mengirimkan tim reaksi cepat Satlak PBP dan mengerahkan Satgas PBP untuk melaksanakan pertolongan kepada korban bencana
- (3) Memberikan isyarat tanda bahaya
- (4) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Satlak PBP

b) Bidang Komunikasi dan Perhubungan/ Angkutan

i) Ketua : Ka Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

ii) Wakil Ketua : Ka Organda Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

- (1) Kakan PDE Kabupaten Bojonegoro
- (2) Kabag Umum Setda Bojonegoro
- (3) PT. Telkom Kabupaten Bojonegoro
- (4) Perum Kereta Api Kabupaten Bojonegoro
- (5) Camat se Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Komunikasi dan Perhubungan Angkutan

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait untuk memberikan kemudahan sarana angkutan dan komunikasi bagi para pengungsi dan para korban bencana alam
- (2) Membantu untuk menyampaikan berita atau pesan kepada sanak keluarga yang terpisah, sehingga komunikasinya dapat berlangsung dengan baik

- (3) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Satlak PBP

c) Bidang Keamanan

- i) Ketua : Waka Polres Kabupaten Bojonegoro
- ii) Wakil Ketua : Kasdim 0813 Kabupaten Bojonegoro
- iii) Anggota-anggota :

- (1) Kabid Pengkajian Strategi Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro
- (2) Satpol PP Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Keamanan

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait khususnya yang menyangkut keamanan dan pengamanan bagi para korban bencana alam dan pengungsi sehingga tercipta kondisi dan situasi yang kondusif
- (2) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Satlak PBP

d) Bidang Pioner, Penampungan / Pemukiman dan Dapur Umum

- i) Ketua : Kasdim 08130 Bojonegoro
- ii) Wakil Ketua : Ka Disnaker dan Trans Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

- (1) Kadin Kimpraswil Kabupaten Bojonegoro
- (2) Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
- (3) Kabag Perlengkapan Setda Bojonegoro
- (4) PT. PLN Kabupaten Bojonegoro
- (5) Ka. Cab PMI Kabupaten Bojonegoro
- (6) Kwarcab Pramuka Kabupaten Bojonegoro
- (7) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten

iv) Tugas Bidang Pioner, Penampungan / Pemukiman dan Dapur Umum

- (1) Melakukan koordinasi dan institusi terkait dalam rangka penyiapan logistik dan permakanaan bagi para korban bencana dan para pengungsi utamanya pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda penampungan dan pemberian permakanaan bagi para korban bencana alam di tempat penampungan
- (2) Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk bisa menerima anak pengungsi tanpa syarat administrasi dan dibebaskan dari pungutan apapun
- (3) Mengkoordinasikan pendirian penampungan sementara bagi korban bencana
- (4) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Satlak PBP

e) Bidang Bantuan Sosial

- i) Ketua : Ka Badan KB dan Kesos Kabupaten Bojonegoro
- ii) Wakil Ketua : Kasub Dolog Kabupaten Bojonegoro
- iii) Anggota-anggota :
 - (1) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro
 - (2) Ka Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro
 - (3) Ka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
 - (4) Ka Dinas Hutbun Kabupaten Bojonegoro
 - (5) Ka Diperindag Kabupaten Bojonegoro
 - (6) Ka Cab PMI Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Bantuan Sosial

- (1) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi maupun institusi yang terkait dalam menerima maupun penyaluran bantuan guna pengendalian dan mencegah adanya tumpang tindih dalam penyaluran bantuan (termasuk didalamnya pencatatan bantuan yang diterima dari pemerintah dan masyarakat)
- (2) Mengkoordinasikan pemyaluran bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat
- (3) Memberikan bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis kepada warga masyarakat yang mengalami penderitaan
- (4) Mengendalikan moril dan mengatasi kepanikan masyarakat yang tertimpa bencana untuk mengurangi bertambahnya korban
- (5) Melakukan pendataan korban bencana
- (6) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Satlak PBP

f) Bidang Kesehatan

- i) Ketua : Kadin Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
- ii) Wakil Ketua : Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro
- iii) Anggota-anggota :

- (1) Puskesmas se Kabupaten Bojonegoro
- (2) Kacab PMI Kabupaten Bojonegoro
- (3) RS. Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro
- (4) RS. Bhayangkara Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Kesehatan

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi, LSM dan RS terkait guna memberikan pelayanan kesehatan maupun

rujukan bagi para korban bencana alam dan pengungsi diutamakan pelayanan kesehatan darurat dan perbaikan kondisi perorangan

- (2) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait khususnya yang menyangkut Pelayanan *Psychosocial Traumatic Treatment*
- (3) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam rangka Pengamatan Penyakit Potensial Wabah / KLB dan Pemantauan status gizi balita
- (4) Menerima dan menyalurkan bantuan obat-obatan
- (5) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Satlak PBP
- (6) Menyiapkan dan mengirim bantuan
- (7) Menyiapkan tenaga medis / paramedis, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan bahan makanan yang diperlukan.
- (8) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangan kepada Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP

Pemerintah menyiapkan bantuan yang diperlukan masyarakat baik bantuan sosial maupun bantuan kesehatan. Tabel 13 Berikut merupakan rekapitulasi Penerimaan Bantuan yang melibatkan seluruh komponen baik Pemerintah Daerah masyarakat maupun swasta.

Sedangkan penyebaran bantuan bisa dilihat dari Gambar 4 berikut yang merupakan Peta penyebaran bantuan yang ditujukan kepada daerah-daerah yang terkena banjir. Peta ini menunjukkan penyebaran bantuan di Kecamatan-kecamatan yang terkena banjir beserta jumlah bantuan yang diberikan.

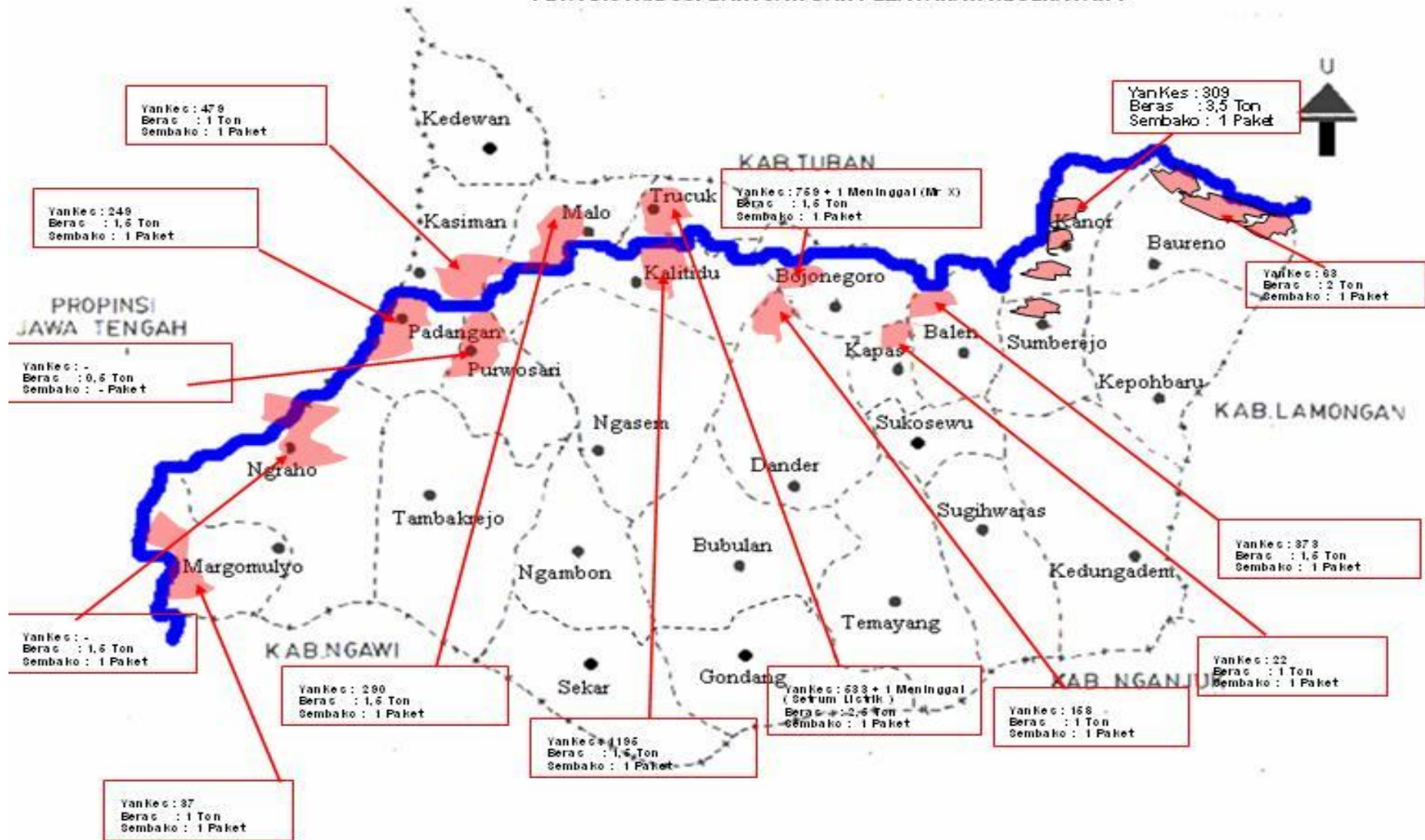
Tabel 13

Rekapitulasi Penerimaan Bantuan Pada tanggal 24 Februari s/d 3 Maret 2009 Satlak PBP Kabupaten Bojonegoro

No	Jenis Bantuan	Asal Bantuan										JML
		Pemkab Bjnegero	Petrokimia	Bank Jatim	Partai x	NN	Bpk. Handoko	PT. SER Sby	PT. FIL	PMI Cab. Bojonegoro	Koperasi (KOPEN)	
1	Beras	10000				1000			5000			16000
2	Minyak Goreng	125										125
3	Kecap	288										288
4	Biskuit			200				113				313
5	Mie Instan	424		100		75		150			133	882
6	Matras besar			50								50
7	Telur	180										180
8	Air mineral	45						500				545
9	Karung pasir				5000		10000					15000
10	Sembako		2500									2500
11	Tikar			50					1			50
12	Lilin	1										2
13	Autan	2										2
14	Senter besar	2										2
15	Makanan bayi											12
16	Nasi bungkus									1172		1172
17	Ikan asin (dos)	12										12
18	Kertas minyak	41										41

Sumber: Satlak Kabupaten Bojonegoro

PETA DISTRIBUSI BANTUAN DAN PELAYANAN KESEHATAN :



Peran Serta Masyarakat Pada Saat Terjadinya Banjir

Saat terjadinya bencana adalah saat yang paling utama semua komponen baik masyarakat dan pemerintah serta Kelurahan dan RT/RW untuk bahu-membahu dalam proses evakuasi warga.

1) Gotong-royong dalam proses evakuasi

Proses ini dinilai telah cukup baik karena telah terjalin koordinasi yang baik pula antar warga masyarakat dengan pihak RT/RW maupun Kelurahan serta gotong-royong yang tinggi antar warga masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan pula oleh Bpk. Mohamad Yasir, S.Sos yang menyatakan bahwa

“Ketika banjir terjadi untuk evakuasi warga masyarakat memakai “Gethek” yaitu perahu sederhana dari pelepah pisang yang dirakit untuk mengangkut orang maupun barang-barang penting mereka” (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

2) Kelurahan melakukan peningkatan keamanan di malam hari. Lebih lanjut Bpk Yasir menjelaskan

“Saat terjadi banjir kelurahan melakukan patrol bergilir untuk memantau warga karena di malam hari kejahatan akan meningkat. Siskmling juga ditingkatkan karena banyak penjarahan atau pencurian terutama di malam hari” (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

3) Kelurahan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan PMI untuk pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pangan atau dapur umum. Hasil wawancara dengan Bpk Yasir

“Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika bencana banjir kelurahan melakukan koordinasi dengan PMI agar bantuan yang diberikan dapat mencapai sasaran” (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

c. Tahap Pemulihan atau Pasca Banjir

i. Operasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Sesudah Terjadi Bencana adalah:

- 1) Melaporkan jumlah korban dan pemberian jumlah kerugian akibat bencana.

Tabel 14

Rekapitulasi Korban Bencana Alam Banjir Akibat Luapan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro (Tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan Tanggal 4 Maret 2009 Pukul 18.00)

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Kecamatan Yang Terkena Banjir	15 Kecamatan	
2	Desa Yang Terkena Banjir	155 Desa	
3	Warga Yang Terkena Banjir	32.961 KK	
4	Korban Banjir	118.529 Jiwa	
5	Pengungsi	23.058 Jiwa	
6	Korban Meninggal	7 Orang	3 Korban Bandang, 3 Korban Luapan Bengawan, 1 Korban Tenggelam di Sungai Sukorejo
7	Rumah Yang Tergenang	24.966 Unit	
8	Rumah Rusak Ringan	36 Unit	
9	Rumah Rusak Berat	12 Unit	
10	Tanaman Padi	10.446 Ha	
11	Tanaman Jagung	1.556 Ha	
12	Tanaman Polowijo	854 Ha	
13	Ternak (Sapi + Kambing)	4.169 Ekor	
14	TK	32 Unit	
15	SD	132 Unit	
16	SMP	14 Unit	
17	SMA	- Unit	
18	Masjid	73 Unit	
19	Musholla	331 Unit	
20	Jalan Desa	302.250 Meter	
21	Jembatan	23 Unit	
22	Titik Pengungsi	51 Lokasi	

Sumber: Satlak PBP Kab. Bojonegoro tahun 2009

Tabel 15

Kerugian Banjir Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009

No	Bangunan yang Rusak	Jumlah Kerusakan	Kerugian dalam Rupiah
1	Perumahan	11.027 Unit	Rp. 70.369.390.000
2	Prasarana Jalan	68,754 Km	Rp. 25.003.000.000
3	Tanaman Pertanian	2.027 Ha	Rp. 14.342.180.000
4	Gedung Sekolah	74 Unit	Rp. 12.549.690.400

No	Bangunan yang Rusak	Jumlah Kerusakan	Kerugian dalam Rupiah
5	Tempat Ibadah	84 Unit	Rp. 2.226.028.800

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro tahun 2009

- 2) Melaporkan jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana
- 3) Mendorong terciptanya situasi yang kondusif kelancaran pemerintah dan pembangunan
- 4) Mengusahakan perbaikan perekonomian rakyat

ii. Dinas atau Instansi terkait dalam Kelompok Penanganan Pasca Bencana antara lain:

a) Bidang Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

- i) Ketua : Ka BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro
- ii) Wakil Ketua : Ka Dinas Kimpraswil Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

- (1) Ka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro
- (2) Ka Sub Din Bina Marga Kabupaten Bojonegoro
- (3) Ka Sub Din Pengairan Kabupaten Bojonegoro
- (4) Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
- (5) Ka Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
- (6) Ka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro
- (7) Ka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
- (8) Ka Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro
- (9) Ka Bagian Pengendalian DAL Setda Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam rangka pembenahan lingkungan permukiman akibat bencana alam dan pembangunan

rumah sisipan dan rumah sederhana, maupun merelokasikan kembali para pengungsi

(2) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam rangka pembenahan/rehabilitasi sarana prasarana umum

b) Melakukan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam rangka pembenahan pemukiman

c) Bidang Rehabilitasi Sosial

i) Ketua : Ka Badan PMD Kabupaten Bojonegoro

ii) Wakil Ketua : Ka Badan KB dan Kesos Kabupaten Bojonegoro

iii) Anggota-anggota :

(1) Kakan Depag Kabupaten Bojonegoro

(2) Kadin Kesehatan Kabupaten Bojonegoro

(3) Kadin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro

(4) Kacab PMI Kabupaten Bojonegoro

iv) Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial

(1) Memberikan bantuan rehabilitasi sosial dan psikologis kepada warga masyarakat yang mengalami penderitaan

(2) Memberikan bantuan bagi para korban bencana yang merasakan *powerless*/ketidakberdayaan

(3) Memberikan pendampingan bagi para korban bencana yang mengalami traumatis akibat bencana

(4) Memberikan bantuan bagi korban bencana yang mengalami gangguan kesehatan menahun

(5) Memberikan pendampingan dan pemberian bantuan konsultasi bagi korban bencana yang mengalami kehilangan atas semua yang dimiliki (harta benda dan orang-orang terdekatnya). Bantuan pasca bencana yang diberikan bisa dilihat dalam tabel 16 berikut

iii. peran Serta Masyarakat Pada Proses Pemulihan atau Pasca Banjir

- 1) Setelah kembali ke rumah masing-masing masyarakat memeriksa rumah dan melihat jika ada tanda-tanda retakan di dinding atau kerusakan-kerusakan lainnya yang mungkin berbahaya dan membersihkan rumah mereka masing-masing. Menurut penjelasan Bpk Yasir

“Masyarakat setempat melaporkan jika ada kerusakan ke Ketua RT/RW yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Kelurahan agar ditindaklanjuti” (wawancara tanggal 13 April 2009 di Kantor Kelurahan Ledok Wetan)

- 2) Selain membersihkan rumah masing-masing Masyarakat bergotong-royong membersihkan fasilitas umum seperti masjid, musholla, dan jalan yang dikoordinir oleh Kelurahan.
- 3) Kelurahan juga yang berperan dalam pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik, berinisiatif dalam perbaikan sarana dan prasarana publik yang rusak tersebut.
- 4) Kelurahan mengajukan usulan pembiayaan program penanggulangan bencana kepada pemerintah pusat mengajukan program-program pencegahan bencana, untuk mencegah bencana terulang kembali.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Manajemen Bencana

a. Faktor Pendorong

- i. Koordinasi antar Dinas dan Instansi terkait dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana. Menurut keterangan dari Kepala Dinas PU Bpk. Andi Tjandra

“Pemerintah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam penanggulangan bencana banjir. Beberapa diantaranya datang langsung ke pintu-pintu air untuk mendampingi masyarakat memantau perkembangan air yang masuk sehingga tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti tahun lalu dapat dihindari”. (wawancara tanggal 20 April di Kantor Dinas PU Bojonegoro)

- ii. Kebersamaan antar masyarakat yang terlihat dari bantuan yang diberikan bukan hanya dari Pemerintah Kabupaten saja tetapi juga dari

masyarakat yang tidak terkena banjir serta dari pihak swasta. Menurut pernyataan dari Bpk Maskan Ali anggota Satlak PBP

“Bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah saja namun dari pihak swasta dan dari masyarakat sendiri yang tidak terkena banjir dengan sukarela membantu.” (wawancara tanggal 7 april 2009 di kantornya)

iii. Masyarakat yang telah setiap tahun terkena banjir cenderung lebih siap sehingga tahu yang akan dilakukan dan tidak menyebabkan trauma bagi masyarakat korban bencana banjir. Berdasarkan keterangan dari Bpk Maskan Ali

“Masyarakat di bantaran sungai biasanya sudah terbiasa dengan keadaan banjir yang terjadi setiap tahun sehingga masyarakat tidak merasa trauma dan menghadapi banjir dengan tenang misalnya masyarakat sudah tahu akan mengungsi kemana” (wawancara tanggal 7 april 2009 di kantornya)

b. Faktor Penghambat

i. Pemikiran masyarakat yang masih sederhana dan cenderung menganggap remeh bencana yang setiap tahun mereka hadapi. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Bojonegoro

“Masyarakat cenderung berpikir sudah setiap tahun menghadapi banjir sehingga ada yang tidak mau mengungsi sehingga sulit untuk mendeteksi apakah telah mengungsi atau belum” (wawancara tanggal 20 April di Kantor Dinas PU Bojonegoro)

ii. Tenaga yang kurang terlatih di Pemerintahan sehingga hanya mengandalkan Tim SAR. Selanjutnya Kepala Dinas PU mengatakan tentang Tenaga SAR di Bojonegoro

“Kurangya tenaga terlatih di pemerintah dan hanya mengandalkan Tim SAR yang jumlahnya terbatas, sehingga perlu untuk para karyawan atau pegawai di pemerintahan dididik dan dilatih dasar pendidikan SAR” (wawancara tanggal 20 April di Kantor Dinas PU Bojonegoro)

C. PEMBAHASAN

1. Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana

a. Pada Proses Sebelum Terjadinya Bencana

Pada proses sebelum terjadinya banjir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan penanggulangan bencana banjir di Bojonegoro yang meliputi tiga hal antara lain pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sesuai dengan Undang-Undang Manajemen Bencana No.24 tahun 2007. Pemerintah Daerah beserta masyarakat telah bersinergi dengan baik dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari kesiapan Pemerintah Daerah yang berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Ditinjau dari Manajemen Bencana Salah satu prinsip yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah melaksanakan Penanggulangan bencana sesuai dengan prinsip penanganan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Dinas dan Instansi terkait dalam Manajemen Bencana yang ditunjukkan dalam Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana. Selain koordinasi juga keterpaduan dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung meliputi beberapa kelompok mulai dari kelompok sebelum bencana, saat terjadinya bencana dan kelompok penanganan setelah bencana. Dalam penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Operasional Satlak PBP Sebelum Terjadinya Bencana salah satunya adalah membuat Peta Daerah Rawan Bencana. Peta rawan bencana merupakan salah satu persiapan dalam menghadapi banjir, diperlukan dalam penilaian bahaya di seluruh daerah yang rawan untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat Bojonegoro. Menurut Sphere, penilaian bahaya diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu sehingga nantinya

dapat menghasilkan peta potensi bencana yang menunjukkan daerah mana saja yang nantinya akan dijadikan kawasan rawan bencana. Tahapan-tahapan tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak SATLAK PB Kabupaten Bojonegoro, tetapi pada proses dari tiap tahapan tersebut masih kurang sehingga diperlukan pembaharuan secara terus-menerus.

Pada hakekatnya bencana banjir merupakan bencana regional karena tidak hanya melanda Kabupaten Bojonegoro saja tetapi melanda juga di daerah lain yang dilalui Bengawan Solo. Penanganan banjir yang terjadi tidak cukup hanya penanganan di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat regional atau bahkan nasional mengingat korban banjir yang meluas.

Penanganan secara regional dilakukan dengan melakukan kerjasama antar daerah-daerah yang dilalui sungai Bengawan Solo mulai daerah hulu sampai daerah hilir. Penanganan bencana harus pada upaya agar tidak terjadi banjir di tahun selanjutnya dengan mengatasi akar permasalahan sungai Bengawan Solo. Untuk mengatasi banjir selanjutnya adalah semua daerah yang ada di sepanjang sungai Bengawan Solo harus melakukan kerjasama untuk mencegah agar banjir ini terjadi lagi.

i. Peran Serta Masyarakat Pada Proses Sebelum Terjadinya banjir

Partisipasi aktif masyarakat juga telah terlihat, hal ini sejalan dengan standar minimum manajemen yang diungkapkan dalam Piagam Sphere bahwa penduduk yang terkena bencana secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program bantuan.

Dalam Undang-undang no 24 tahun 2007 dijelaskan prinsip dalam penanggulangan bencana adalah prinsip kemitraan bahwa penanggulangan bencana diperlukan hubungan dan jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat yang terkena bencana dalam proses penanggulangan meskipun dengan pengetahuan dan kemampuan yang masih relatif sederhana, namun karena sudah setiap tahun mereka mengalaminya jadi persiapannya sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, Kajian awal juga

dilakukan karena memberikan suatu pemahaman tentang situasi bencana dan situasi analisis yang jelas tentang ancaman terhadap kehidupan, martabat, kesehatan, dan penghidupan. Sebagai contoh yang dilakukan adalah dengan membuat Peta Rawan Bencana sehingga pemerintah tahu akan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah rawan banjir.

Dalam hal pencegahan, RT/RW dengan Kelurahan saling berkoordinasi, terutama RT/RW yang berpengaruh besar sebab mereka mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat lokal. Maksudnya adalah RT/RW merupakan lembaga yang hidup langsung dan juga bersama dengan masyarakat. RT/RW juga merupakan lembaga pertama yang mendapatkan masukan dan juga kritik dari masyarakat lokal. Oleh karena itu cukup beralasan bahwa RT/RW menjadi lembaga yang paling mengetahui secara menyeluruh permasalahan masyarakat lokal.

Pada tahapan pra bencana, Kelurahan dapat melakukan banyak hal, seperti melakukan pemetaan rawan bencana, membuat sumur resapan, menyediakan cadangan pangan dan sandang, sosialisasi dan pelatihan prosedur tetap penanggulangan banjir, membangun fasilitas pengolahan limbah dan sampah, sampai dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai, seperti membuat pemukiman atau membuang sampah ke sungai.

Kenyataannya adalah kelurahan tidak berbuat banyak. Padahal seperti diuraikan di atas, tanggung jawab dari Kelurahan sangatlah banyak dan beragam pula jenisnya. Kelurahan yang bertanggung jawab sebab Kelurahan merupakan kelembagaan yang paling rendah dimana mewakili keberadaan pemerintah secara resmi. Oleh karena itu, Kelurahan sudah seharusnya lebih aktif lagi dalam mengangkat permasalahan daerahnya dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan bencana seperti disebutkan di atas.

Untuk lebih memaksimalkan kegiatan ini, maka cukup penting bila kegiatan ini diiringi dengan sosialisasi. Hal ini cukup penting sebab dengan penggambaran yang rinci ditambah dengan sosialisasi rutin, maka

masyarakat akan selalu diingatkan, selain itu masyarakat juga merasa diperhatikan Kelurahan, sehingga dengan begitu diharapkan akan muncul kerjasama di antara keduanya secara efektif dan efisien.

Kegiatan lainnya yang cukup efektif dilakukan Kelurahan adalah berkoordinasi dengan Kelurahan lainnya. Banjir adalah sebuah bencana yang muncul seringkali karena arus sungai yang meninggi dan akhirnya membanjiri pemukiman sekitar sungai.

Sejalan dengan definisi *Governance* yang diungkapkan oleh Lipchak bahwa pemerintah berfungsi dan bekerjasama dalam pembuatan keputusan untuk dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan *Good Governance* maka tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Good Governance*.

b. Pada Saat Terjadinya Banjir

i. Operasional Satlak PBP Saat Terjadinya Banjir

Dalam proses penanganan bencana dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril, maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi. Langkah yang dilakukan Satlak mencakup hal-hal yang penting dalam proses penanggulangan saat banjir diantaranya mengirimkan TRC (Tim Reaksi Cepat) Satlak PBP ke Daerah Bencana, menganalisa bencana yang terjadi, mengadakan rapat koordinasi Satlak PBP, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, menyiapkan / mengirimkan Satgas PBP ke Daerah Bencana, menyiapkan dan mengirim bantuan, menyiapkan tenaga medis / paramedis, obat-

obatan, pakaian layak pakai, dan bahan makanan yang diperlukan. Upaya ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat korban bencana banjir.

ii. Peran Serta Masyarakat Pada Saat Terjadinya Banjir

Pada saat tepat terjadinya bencana, masyarakat yang menjadi korban bencana yang sebenarnya berperan paling besar. Pada fase ini terutama pada saat tepat terjadinya bencana, *masyarakat* yang menjadi korban bencana yang berperan dalam penanganannya. Masyarakat secara spontan berusaha menyelamatkan diri dan bahu-membahu berupaya mengatasi bencana

Pada tahapan berikutnya, yakni saat terjadinya bencana maka hal yang paling mendesak adalah mengevakuasi, dan mengungsikan penduduk ke daerah aman. Setelah itu mencukupi *kebutuhan* pangan dan sandang. Kegiatan berikutnya adalah mendata jumlah dan lokasi korban bencana, agar bantuan yang diberikan lebih efektif dan efisien. Idealnya seluruh rangkaian kegiatan ini terencana, sehingga dapat berjalan dengan lebih lancar, karena kelancaran kegiatan penanganan sebuah bencana sudah seharusnya lancar dan rapih. Selain itu, dikaitkan dengan peran kelembagaan lokal, idealnya Kelurahan dibantu dengan RT/RW melakukan hal ini dengan bekerja sama, yaitu Kelurahan lebih sebagai pehubung dengan pemberi bantuan, baik donor pribadi maupun pemerintah, dan RT/RW lebih sebagai pehubung antara bantuan yang ada dengan korban bencana yang memerlukan.

Namun sayangnya, kedua hal ini tidak terjadi. Yang muncul justru adalah rangkaian kegiatan tersebut tidak terencana secara menyeluruh. Maksudnya adalah masyarakat sudah merasa biasa mendapatkan bencana, sehingga mereka sudah mengetahui kemana mereka harus mengevakuasi diri. Namun rencana yang muncul sebatas itu saja, bagaimana pangan dan sandang, beserta juga pelayanan kesehatan yang dibutuhkan seringkali tidak terencana, sehingga akhirnya korban bencana seringkali terlambat menerima bencana. Hal ini dapat terjadi karena

banyak hal, pertama karena kurangnya kerjasama yang dalam hal ini RT/RW dengan Kelurahan. Apabila mereka bekerjasama mulai dari sebelum terjadinya bencana, dengan membuat rencana matang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing, maka pada saat bencana tentunya hal-hal darurat yang sangat dibutuhkan oleh korban bencana telah dapat tersedia.

Kerjasama yang dilakukan secara ideal adalah Kelurahan berkonsentrasi dalam membina hubungannya dengan masyarakat luar yang ingin menyumbang dan juga tentunya pemerintah pusat, yang dalam hal ini dengan Kecamatan. Kelurahan adalah lembaga yang resmi sehingga akan lebih mudah dalam melakukan hal ini. Selain itu Kelurahan juga merupakan lembaga yang umumnya aparatnya lebih profesional daripada lembaga, seperti RT/RW yang dipilih bukan berdasarkan atas profesionalitas, namun lebih kepada kemampuan memimpin.

c. Pada Proses Pemulihan atau Pasca Banjir

i. Operasional Satlak PBP Pada Tahap Pasca Banjir

Pada proses pemulihan atau Pasca Banjir Pemerintah dengan masyarakat melakukan kegiatan diantaranya bergotong-royong membersihkan jalan-jalan, fasilitas umum, genangan-genangan air dan kerusakan lainnya akibat bencana banjir. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah selain memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pasca banjir Pemerintah Kabupaten mempunyai program yang meliputi: melaporkan jumlah korban dan pemberian jumlah kerugian akibat bencana, melaporkan jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana mendorong terciptanya situasi yang kondusif kelancaran pemerintah dan pembangunan, mengusahakan perbaikan perekonomian rakyat.

Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan dalam penanganan Pasca Banjir di Bojonegoro yaitu kurang aktifnya Pemerintah Daerah dalam penanganannya karena berkaitan dengan

perbaikan fasilitas publik Pemerintah Daerah dirancang untuk memperbaiki fasilitas dari daerahnya yang rusak dan mengevaluasi kebutuhan masyarakat akibat dari bencana yang menimpanya. Misalnya saja dalam hal peralatan yang digunakan untuk membersihkan genangan air, dalam setiap Kelurahan yang terkena banjir tidak disediakan peralatan yang memadai. Selama ini pihak Kelurahan hanya mendapatkan peralatan tersebut dengan menyewa sehingga kurang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.

ii. Peran Serta Masyarakat Pada Proses Pemulihan atau Pasca Banjir

Pada fase ketiga dalam siklus bencana, yakni fase pemulihan atau pasca terjadinya bencana, peran kelembagaan lokal yang dominan dilaksanakan oleh Kelurahan. Kelurahan mendapatkan dana dan bantuan dari pemerintah pusat. Selain dari pemerintah pusat, Kelurahan juga menerima sumbangan dari masyarakat yang tidak terkena bencana dan ingin turut menolong. Sehingga sebenarnya Kelurahan lebih bersifat sebagai sebuah lembaga yang bertugas memajemen bantuan yang datang dari berbagai pihak untuk disalurkan secara tepat bagi masyarakat yang terkena bencana. Inilah alasan dari lebih dominannya Kelurahan dalam fase pemulihan setelah bencana, yaitu karena Kelurahan mempunyai posisi yang paling strategis dalam fase ini. Kelurahan juga yang berperan dalam pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik, berinisiatif dalam perbaikan sarana dan prasarana publik yang rusak tersebut, mengkoordinasi dalam pembersihan lingkungan dan yang terpenting adalah Kelurahan merupakan lembaga yang berwenang dalam mengajukan usulan pembiayaan program penanggulangan bencana kepada pemerintah pusat.

Ada beberapa persyaratan bagi keberhasilan kerja kemitraan, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya ia mengajukan pedoman terselenggaranya proses ini, yang meliputi pelatihan semua pihak

yang terlibat, penggunaan yang hati-hati bahasa yang digunakan ketika berinteraksi dengan orang-orang setempat, penggunaan contoh-contoh, akuntabilitas dan pemerintahan yang terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan ke dalam tugas-tugas yang mudah dicapai, mendorong masyarakat setempat menjadi sadar informasi, dan adaptasi secara terus-menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru.

Masyarakat juga berperan dalam perbaikan daerahnya namun dengan pengarahan dari Pemerintah Kabupaten. Namun karena tergantungnya masyarakat dengan pemerintah daerah, maka masyarakat cenderung kurang mandiri hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Manajemen Bencana

Faktor Pendorong

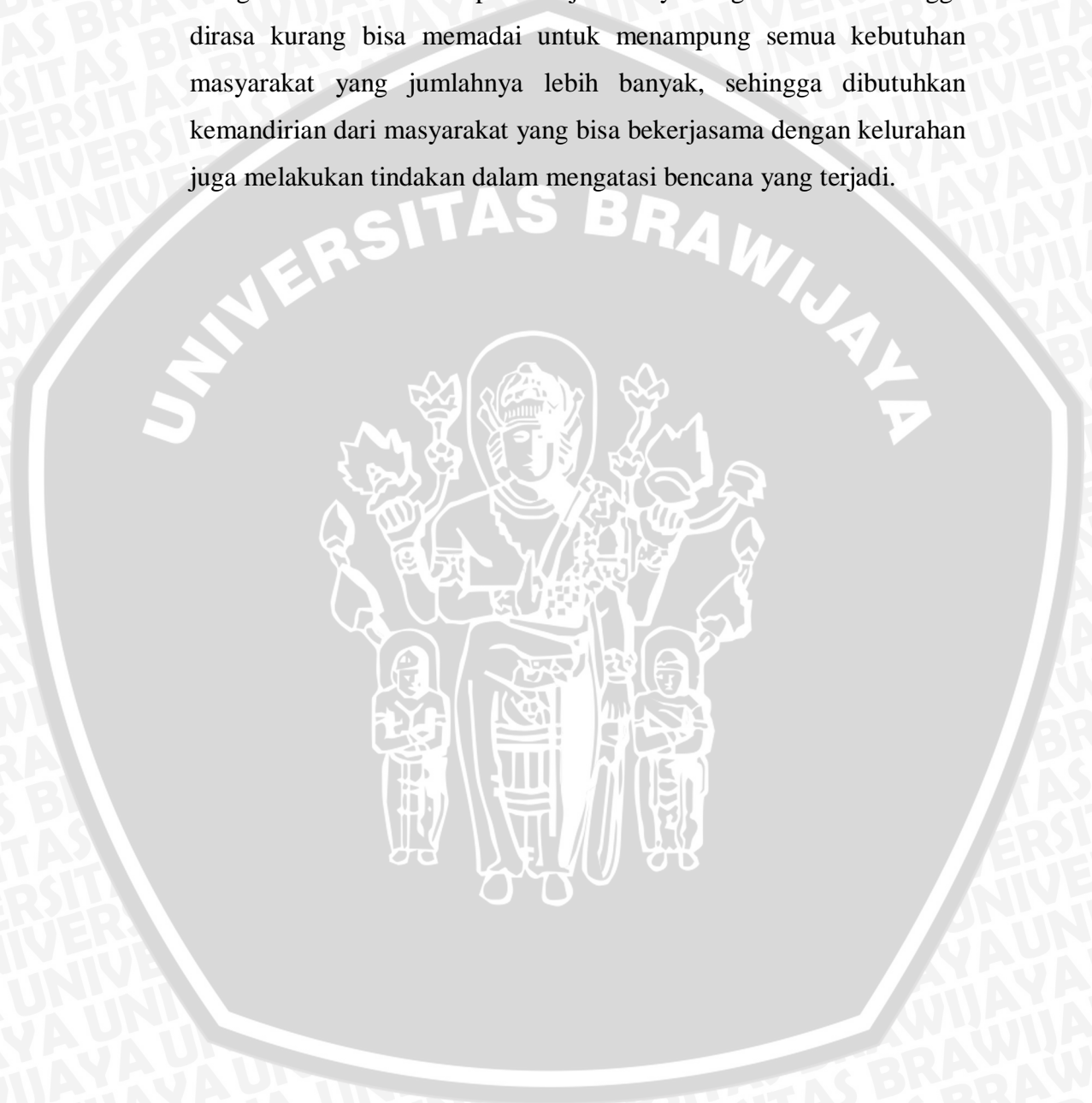
- a. Koordinasi antar Dinas dan Instansi terkait dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana
- b. Kebersamaan antar masyarakat yang terlihat dari bantuan yang diberikan bukan hanya dari Pemerintah Kabupaten saja tetapi juga dari masyarakat yang tidak terkena banjir serta dari pihak swasta.
- c. Masyarakat yang sudah setiap tahun terkena banjir menjadi terbiasa dengan keadaan sehingga mereka sudah siap ketika menghadapi banjir tiba meskipun masih dengan cara yang relatif sederhana jadi trauma tidak ada dalam diri mereka.

Faktor Penghambat

- a. Pemikiran masyarakat yang masih sederhana dan cenderung menganggap remeh bencana yang setiap tahun mereka hadapi Terlalu tergantungnya masyarakat terhadap pemerintah mereka beralasan bahwa mereka adalah orang miskin sehingga sudah seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal dalam kondisi sekarang dimana pemerintah terlihat sibuk dengan “diri” mereka sendiri sudah seharusnya masyarakat yang dapat dipimpin oleh

RT/RW bersikap mandiri, untuk menghindari bencana, karena mereka sendiri yang merasakan bencana, dan menghindari lebih murah dan mudah daripada harus menghadapi bencana.

- b. Tenaga yang kurang terlatih di Pemerintahan sehingga hanya mengandalkan Tim SAR padahal jumlahnya sangat terbatas sehingga dirasa kurang bisa memadai untuk menampung semua kebutuhan masyarakat yang jumlahnya lebih banyak, sehingga dibutuhkan kemandirian dari masyarakat yang bisa bekerjasama dengan kelurahan juga melakukan tindakan dalam mengatasi bencana yang terjadi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro tentang Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana, maka dapat ditarik kesimpulan yang meliputi:

1. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana telah terbentuk dengan cukup baik. Hal ini bisa dinilai dari peran serta semua pihak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat dalam proses Manajemen Bencana
 - a. Pada Tahap Sebelum bencana Pemerintah Daerah melakukan penanganan sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan semua Dinas dan Instansi terkait, sedangkan masyarakat telah melakukan persiapan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Namun, karena pengetahuan mereka yang terbatas maka kemampuan mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan cenderung kurang terutama untuk masyarakat di daerah bantaran sungai yang rawan terjadinya bencana karena kebanyakan dari mereka juga menganggap hal yang biasa sehingga menganggap remeh bencana yang datang. Untuk itu Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus dapat mengcover kesulitan masyarakat tersebut. Lembaga Lokal yaitu kelurahan juga berperan baik dalam tahap ini namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan masyarakat merasa kurang diperhatikan sehingga masyarakat kurang bisa bekerjasama dengan baik dengan kelurahan. Kerjasama antar daerah juga diperlukan dalam mengatasi bencana banjir ini mengingat bencana bojonegoro ini dikategorikan bencana regional yang harus melibatkan banyak pihak terutama untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan sungai Bengawan Solo.
 - b. Saat terjadinya bencana pemerintah berperan baik dalam proses evakuasi warga dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama

untuk masyarakat korban banjir yang ada di tempat pengungsian. Sedangkan masyarakat dengan swadaya sendiri juga membantu proses evakuasi secara gotong-royong terutama untuk menyelamatkan barang berharga ataupun keluarganya. Karena sudah setiap tahun mereka alami maka banjir bukanlah hal yang baru dan tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat justru masyarakat lebih punya persiapan meskipun hanya dengan menggunakan peralatan yang sederhana, bahkan sebagian dari mereka menganggap banjir adalah anugerah karena mereka memanfaatkan endapan banjir untuk mata pencaharian mereka. Kerjasama masyarakat dengan kelurahan saat bencana sudah berlangsung baik namun kurangnya perencanaan terkadang membuat bantuan yang datang terkesan lamban.

- c. Dalam Tahap Pemulihan/Pasca Bencana Pemerintah Daerah Lebih aktif dalam penanganannya karena berkaitan dengan perbaikan fasilitas publik pemerintah daerah dirancang untuk memperbaiki fasilitas dari daerahnya yang rusak dan mengevaluasi kebutuhan masyarakat akibat dari bencana yang menyimpannya. Sedangkan masyarakat juga berperan dalam perbaikan daerahnya namun dengan pengarahan dari Pemerintah Kabupaten. Namun karena tergantungnya masyarakat dengan pemerintah daerah, maka masyarakat cenderung kurang mandiri hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Dalam proses ini pihak kelurahan mengeluhkan kurangnya peralatan yang memadai menyebabkan lambatnya proses rehabilitasi di tingkat Kelurahan misalnya peralatan untuk membersihkan genangan air akibat banjir yang selama ini didapat dari menyewa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih mendidik masyarakat di bantaran sungai seperti pendidikan untuk menutup tanggul, mengajarkan pola tanam yang cocok saat musim banjir agar tidak hanya tergantung kepada Pemerintah Daerah saat terjadi banjir
2. Lebih mengoptimalkan peran Lembaga-lembaga lokal yaitu Kelurahan dan RT/RW dalam melaksanakan manajemen bencana karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga tahu dengan benar apa kebutuhan dari masyarakat terutama ketika terjadinya bencana banjir.
3. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kebutuhan dari masyarakat maupun Kelurahan yaitu memenuhi kebutuhan peralatan untuk mengatasi genangan air akibat banjir sehingga lebih cepat dalam proses pemulihan pasca banjir.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan kerjasama antar daerah di sepanjang sungai Bengawan Solo dalam mengatasi bencana banjir karena banjir ini tidak hanya melanda daerah Bojonegoro saja tetapi juga seluruh daerah yang dilalui sungai Bengawan Solo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Prosedur Penelitian* : Rineka Cipta
- Hakim, Abdul. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang
- Islami, M. Irfan. 2005. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Medio
- Keban, Yaremis T. 2005. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: (Makalah)
- Krina, Loina L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN dan BPKP
- Lipchak, Andrew. 2002. *Evidence-based Governance in the electronic Age: A Summary of Key Policy Issues. The International Records Management Trust*. (www.ppforum.ca/ow/ow_ppt/LipchakReportfullword.htm)
- Muluk, M.R Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia
- Moleong, Y. Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pamudji, S. 1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta: Bina Aksara
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Poerwadarminta, W. J. S. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pujiono, Puji. 2004. *Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respon Bencana Proyek Sphere*. Jakarta: Grasindo
- Silalahi, T. B. *Membangun Sosok aparatur professional dalam kompetisi global*. Dimuat dalam Kumpulan Tulisan: Pemberdayaan Birokrasi Dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Tim Penyusun Dosen FIA Unibraw. 2007. *Pedoman dan Ujian Skripsi Program Sarjana (S1)*. Malang: Universitas Brawijaya

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance*. Jakarta: UI_Press

UNDP. 1992. Tinjauan Umum Manajemen Bencana. UNDP Program Pelatihan Manajemen Bencana, Edisi ke-2.

Jurnal

Sumartono. 2006. Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* (Vol. VI No.1): 197-207

Internet

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. “*Pengelolaan Bencana: Pengelolaan Kerentanan Masyarakat*”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2008 dari http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/adv_kelol_beencana.html

Rudy. “Desentralisasi Indonesia: Memupuk Demokrasi dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal”, diakses pada tanggal 13 Januari 2009 dari http://rechtboy.wordpress.com/Desentralisasi_Indonesia_Memupuk_Demokrasi_dan_Penciptaan_Tata_Pemerintahan_Lokal_«_Membangun_da.htm

Harian Kompas. “Bojonegoro Siaga II Banjir Bengawan Solo”, diakses pada tanggal 29 april 2009 dari <http://www.kompas\bojonegoro.siaga.II.banjir.bengawan.solo.htm>

Ambrose, Sthephen.2005. “DisaterManagementCycle”, diakses pada Tanggal 02 Oktober 2008 dari http://www.eomonline.com/EOM_Aug05/article.php?Artic...

Sumber lain

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

Bakornas PB Tahun 2005. *Pedoman Penanganan Pasca Bencana*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Penanggulangan Banjir



<http://www.bernegoro.blogspot.com>



<http://www.bernegoro.blogspot.com>



<http://www.bernegoro.blogspot.com>



Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RIMA SILLA ARFINIANTI

NIM : 0510310109

Tempat / Tanggal Lahir : BOJONEGORO / 14 Juni 1986

Pendidikan :

1. SD NEGERI KEPATIHAN BOJONEGORO TAMAT TAHUN 1998
2. SMP NEGERI 1 BOJONEGORO TAMAT TAHUN 2001
3. SMA NEGERI 1 BOJONEGORO TAMAT TAHUN 2004

Pengalaman Kerja :

1. MAGANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III MALANG

Karya Ilmiah :

SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO



Lampiran 3 : Surat Ijin Survey



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon (0353) 881826-151
BOJONEGORO

Bojonegoro, 16 Februari 2009

Kepada Yth :

- 1.Sdr.Kepala BAPPEDA Kab.Bojonegoro
- 2.Sdr.Kepala Dinas PU Kab.Bojonegoro
- 3.Sdr.Camat Bojonegoro

di

BOJONEGORO

SURAT-PENGANTAR

Nomor : 072 / 16 / 204.412 / 2009

Dalam rangka pelaksanaan Survey / Research / Penelitian / KKN / KKL / PKN / PKL / di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dasar :

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dan Kantor Kab.Bojonegoro
2. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perizinan.
3. Surat Dekan FIA Universitas Brawijaya Malang No.1082/J.10.1.14/PG tanggal 11 Februari 2009 perihal riset / survey

Dengan ini diberikan kesempatan melaksanakan riset / survey di Wilayah Kabupaten Bojonegoro guna kepentingan sebagaimana perihal permohonan ijin tersebut diatas.

Kepada :

1. Nama : RIMA SILLA ARFINIANTI
2. NIM : 0510310109
3. Program studi : Administrasi Publik
4. Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah
5. Judul : "Sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam manajemen bencana di Kabupaten Bojonegoro."
6. Waktu : Tmt 16 Februari s/d 16 April 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah melakukan tugasnya diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
7. Surat pengantar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN BOJONEGORO



LUKMAN WAFISH, Msi

Pembina
NIP. 010 199 893

Tembusan Yth :

1. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya di Malang
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 4 : Surat Ijin Survey Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BOJONEGORO
Jl. Pemuda No. 1 Telepon (0353) 881770
BOJONEGORO

Bojonegoro, 20 Pebruari 2009

Nomor : 072 / 059 / 412.51.1 / 2009
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : IJIN SURVEY / RESEARCH

Kepada :
Yth. Sdr. ① Kakel Ledok Wetan
2. Kakel Ledok Kulon
Kecamatan Bojonegoro
Di -
BOJONEGORO

Berdasarkan Surat dari Bakesbang Linmas Bojonegoro tanggal 16 Pebruari 2009, Nomor 072 / 16 / 204.412 / 2009 perihal sebagaimana dalam pokok surat, maka bersama ini dimohon bantuan Saudara agar memberikan kesempatan untuk melaksanakan Survey di Wilayah Kerja Saudara dalam rangka menyusun karya ilmiah di bidang keahliannya di wilayah Saudara, kepada :

Nama : **RIMA SILLA ARFINIANTI**
NIM : 0510310109
Semester : VIII
Jurusan : Administrasi Publik
Tempat penelitian : Kel. Ledok wetan dan Kel Ledok Kulon
Tema / Acara Survey : “ Sinergy antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menajemen bencana di Kabupaten Bojonegoro.”
Lamanya Penelitian : Tmt 16 Pebruari s/d 16 April 2009

Untuk itu kepada yang bersangkutan agar melaksakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menjaga nama baik kantor tujuan serta melaporkan hasilnya apabila sudah selesai .

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Drs. MOEDHWIJANTO, MM

Pembina
NIP. 010 077 232

TEMBUSAN :

Yth : 1. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya
3. Sdri. RIMA SILLA ARFINIANTI